



Katalog BPS : 2302004



INDIKATOR PASAR TENAGA KERJA INDONESIA FEBRUARI 2011



Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia

INDIKATOR
PASAR TENAGA KERJA
INDONESIA
FEBRUARI 2011

ISBN. 2088-5679

No. Publikasi: 04120.1103

Katalog BPS: 2302004

Ukuran Buku: 17 cm x 25 cm

Jumlah Halaman: 105 Halaman

Naskah:

Sub Direktorat Statistik Ketenagakerjaan

Gambar Kulit:

Sub Direktorat Statistik Ketenagakerjaan

Diterbitkan oleh:

Badan Pusat Statistik RI

Dicetak oleh:

Bagian Penggandaan Badan Pusat Statistik

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

<http://www.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Pada periode 2005-2010, Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) dilaksanakan secara semesteran dan sejak Februari 2011 dilaksanakan secara triwulanan. Survei ini mencakup seluruh wilayah Indonesia dan diharapkan dapat memonitor dinamika ketenagakerjaan secara lebih cepat dan berkesinambungan. Sakernas triwulanan ini menghasilkan angka estimasi nasional sampai dengan level provinsi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mulai tahun ini menerbitkan publikasi Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia. Publikasi ini menggambarkan keadaan angkatan kerja di Indonesia pada Triwulan I Februari 2011. Indikator-indikator yang ditampilkan pada publikasi ini mengacu pada *Key Indicators of the Labour Market (KILM)* yang direkomendasikan ILO, dengan harapan bisa dijadikan sebagai sistem peringatan dini (*early warning system*) mengenai kondisi pasar tenaga kerja di Indonesia. Jenis tabel yang ditampilkan dalam publikasi ini dirinci menurut jenis kelamin, daerah perkotaan dan perdesaan, serta hanya mencakup penduduk usia kerja.

Beberapa indikator KILM menurut Provinsi dan tabel pendukung dalam indikator KILM yang ditetapkan, disajikan pada lampiran publikasi ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya publikasi ini, disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih. Kritik dan saran dari pengguna sangat diharapkan demi kesempurnaan publikasi edisi berikutnya.

Jakarta, Mei 2011

Kepala Badan Pusat Statistik
Republik Indonesia,

DR. Rusman Heriawan

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Peran KILM Dalam Analisis Pasar Tenaga Kerja ..	2
1.2. Analisis Pasar Tenaga Kerja Menggunakan KILM ...	4
1.3. Struktur Publikasi	6
BAB 2 PENJELASAN TEKNIS	
2.1. Penjelasan Umum	9
2.2. Konsep Umum	10
2.3. Indikator Kunci Pasar Tenaga Kerja	11
BAB 3 PARTISIPASI DI DUNIA KERJA (KILM 1)	
KILM 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	25
BAB 4 INDIKATOR TENAGA KERJA (KILM 2-7)	
4.1 KILM 2 Rasio Pekerja Terhadap Jumlah Penduduk	29
4.2 KILM 3 Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerja Utama	33
4.3 KILM 4 Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha	36
4.4 KILM 5 Pekerja Paruh Waktu	40
4.5 KILM 6 Jam Kerja	42
4.6 KILM 7 Pekerja Sektor Informal	45

	Halaman
BAB 5	INDIKATOR PENGANGGURAN
5.1	KILM 8 Pengangguran 47
5.2	KILM 9 Pengangguran Pada Kelompok Usia Muda 50
5.3	KILM 11 Pengangguran dan Pendidikan 52
5.4	KILM 12 Setengah Penganggur 55
5.5	KILM 13 Tingkat Ketidaktifan 59
BAB 6	INDIKATOR PENDIDIKAN DAN MELEK HURUF
	KILM 14 Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf 63
LAMPIRAN 67
AKRONIM 95

RINGKASAN EKSEKUTIF

Publikasi ini memuat indikator-indikator kunci pasar tenaga kerja Indonesia berdasarkan hasil Sakernas triwulan I, Februari 2011.

KILM 1 (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/TPAK) pada Februari 2011 sebesar 69,96 persen, dimana TPAK laki-laki jauh lebih tinggi dibanding TPAK perempuan masing-masing 84,86 persen dan 55,13 persen. Sebaliknya dari TPAK adalah tingkat ketidakaktifan (KILM 13). Berdasarkan kelompok umur pada Februari 2011 tingkat ketidakaktifan terkecil (yang berarti bahwa TPAK nya paling besar) terdapat pada umur 35–54 tahun. Persentase laki-laki pada kelompok umur tersebut tingkat ketidakaktifannya hanya 2,20. Sedangkan pada kelompok umur 65 tahun ke atas baik laki-laki maupun perempuan persentase tingkat ketidakaktifan merupakan yang terbesar masing-masing yaitu 42,38 dan 71,20.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada (KILM 8) menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari dan bersedia untuk bekerja pada Februari 2011 adalah 6,80 persen. Berdasarkan jenis kelamin, TPT perempuan yaitu 7,38 persen lebih tinggi dibandingkan TPT laki-laki hanya 6,42 persen meskipun secara absolut jumlah penganggur laki-laki lebih banyak dibanding penganggur perempuan. Tingkat pengangguran ini kemudian dirinci berdasarkan umur yang tergambar dalam KILM 9 (Pengangguran Pada Kelompok Usia Muda) dimana TPT usia muda adalah sebesar 23,92 persen atau lebih dari tiga kali lipat TPT semua umur (nasional).

KILM 2 (Rasio Pekerja Terhadap Jumlah Penduduk/EPR) pada Februari 2011 mencapai 65,21. Artinya dari 100 orang penduduk yang berusia 15 tahun ke atas, 65 orang diantaranya bekerja. Rasio pekerja laki-laki terhadap jumlah penduduk laki-laki usia kerja lebih tinggi daripada rasio pekerja perempuan terhadap jumlah penduduk perempuan usia kerja, masing-masing sebesar 79,41 dan 51,06.

KILM 3 merupakan indikator penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan utama menunjukkan bahwa penduduk yang bekerja berstatus

buruh/karyawan/pegawai menerima upah/gaji mencapai 31,01 persen, sedangkan penduduk yang berstatus berusaha dibantu buruh tetap atau pengusaha hanya sebesar 3,23 persen. Persentase penduduk perempuan yang bekerja sebagai pekerja keluarga masih relatif tinggi yaitu sebesar 33,93 persen. Sementara itu, rasio penduduk bekerja yang tergolong "pekerja rentan/*vulnerable employment*" terhadap total penduduk yang bekerja mencapai 65,76 persen.

Komposisi pekerja sektoral (KILM 4) pada Februari 2011 menunjukkan bahwa sebesar 43,05 persen penduduk bekerja pada sektor jasa, 38,17 persen penduduk bekerja pada sektor pertanian dan 18,78 persen penduduk bekerja pada sektor manufaktur.

Dilihat berdasarkan jam kerja (KILM 6), hasil Sakernas Februari 2011 menunjukkan sebagian besar penduduk bekerja di atas 35 jam perminggu dengan persentase sebesar 67,26. Sedangkan penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam kerja perminggu mencapai 32,74 persen. Dalam kondisi ini pekerja perempuan yang bekerja di bawah 35 jam perminggu lebih mendominasi dibanding pekerja laki-laki terlihat pada hampir setiap pengelompokan jumlah jam kerja 35 jam perminggu ke bawah. Penduduk yang bekerja menurut jam kerja ini membawa kita pada KILM 5 (pekerja paruh waktu), dimana pada Februari 2011 tingkat pekerja paruh waktu mencapai 16,59 persen, sedangkan *share* perempuan pada pekerja paruh waktu sebesar 59,28 persen. Selain itu, berdasarkan jam kerja, juga dapat diturunkan KILM 12 (setengah penganggur) yaitu mereka yang jam kerjanya di bawah ambang batas jam kerja normal (<35 jam dalam seminggu) dan mereka masih mencari atau menerima pekerjaan tambahan untuk menambah jumlah jam kerjanya. Pada Februari 2011 jumlah setengah penganggur di Indonesia adalah 15,74 juta jiwa, dimana 8,81 juta jiwa berjenis kelamin laki-laki dan sisanya adalah perempuan.

KILM 14 (Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf) menggambarkan angkatan kerja di Indonesia masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan terakhir Sekolah Dasar, dengan komposisi persentase yaitu 63,33 untuk kelompok dewasa, 59,21 untuk kelompok usia muda, dan 55,60 untuk kelompok pemuda. Berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan terakhir sekolah tinggi, persentase kelompok pemuda perempuan hampir

dua kali lebih tinggi daripada laki-laki masing-masing 13,86 dan 6,55. Sedangkan KILM 11 (Pengangguran dan Pendidikan) memberikan gambaran jumlah penganggur di Indonesia pada Februari 2011 didominasi oleh mereka yang pendidikan terakhirnya sekolah dasar dan sekolah menengah yang masing-masing persentasenya sebesar 44,74 dan 41,22.

<http://www.bps.go.id>

BAB 1

PENDAHULUAN

Data ketenagakerjaan merupakan aspek penting untuk menggambarkan indikator pasar tenaga kerja di Indonesia. Salah satu sumber penyajian indikator ini berasal dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam usaha monitoring dinamika ketenagakerjaan, agar para pengambil keputusan dapat lebih cepat mengambil kebijakan dalam usaha mengatasi dan memperbaiki permasalahan ketenagakerjaan khususnya di Indonesia, Badan Pusat Statistik, mulai triwulan I Februari 2011 menyusun publikasi yang merujuk pada publikasi Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization-ILO*), yaitu Indikator Kunci Pasar Tenaga Kerja/KILM (*Key Indicator of the Labor Market*). ILO telah meluncurkan Indikator Kunci Pasar Tenaga Kerja/KILM pada tahun 1999 untuk melengkapi program reguler pengumpulan data dan untuk meningkatkan penyebaran data pada elemen kunci dari pasar tenaga kerja dunia.

Pada awalnya KILM dirancang dengan dua tujuan utama, yaitu:

1. Menyajikan satu indikator inti pasar tenaga kerja.
2. Meningkatkan ketersediaan indikator-indikator tersebut untuk memantau perkembangan pasar tenaga kerja terkini. Indikator-indikator ini merupakan hasil kolaborasi yang melibatkan ILO bersama para ahli dari Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (*Organization for Economic Co-operation and Development-OECD*) dan beberapa perwakilan nasional dari Departemen Tenaga Kerja dan kantor statistik berbagai negara.

1.1. Peran KILM Dalam Analisis Pasar Tenaga Kerja

Identifikasi dan kuantifikasi inefisiensi dalam pasar tenaga kerja seperti underutilisasi tenaga kerja dan defisit pekerjaan yang layak adalah langkah pertama dalam merancang kebijakan ketenagakerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Pandangan luas dunia kerja menuntut pengumpulan data yang lengkap, pengorganisasian dan analisa informasi pasar tenaga kerja. Dalam konteks ini, KILM dapat berfungsi sebagai alat dalam memantau dan menilai banyak hal yang terkait dengan fungsi pasar tenaga kerja. Berikut ini adalah beberapa contoh bagaimana KILM dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.

Mempromosikan Agenda ILO : Pekerjaan yang Layak (*Decent Work*)

Salah satu tujuan agenda ILO mempromosikan pekerjaan yang layak adalah untuk memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan produktif, dalam kondisi kebebasan, kesetaraan dan keamanan. Menerapkan konsep "layak" untuk segala bentuk kegiatan ekonomi merupakan sesuatu yang multitafsir. Persepsi mengenai upah yang layak dapat berbeda secara signifikan dari satu orang ke orang lainnya.

Selain pekerjaan yang layak, permasalahan yang muncul dalam dunia ketenagakerjaan adalah kurangnya kesempatan kerja. Kurangnya kesempatan kerja bisa diidentifikasi menggunakan pendekatan indikator pengangguran (KILM 8 dan 9), tetapi juga bisa menggunakan indikator yang lebih rinci yaitu tingkat ketidakaktifan (KILM 13). Untuk kualitas kerja dapat didekati, misalnya, dengan mengidentifikasi individu yang masuk dalam kelompok pekerja rentan (*vulnerable employment*), yaitu berdasarkan status dan sektor (KILM 3 dan 4), jam kerja yang berlebihan (KILM 6), pekerja sektor informal (KILM 7) dan setengah penganggur (KILM 12).

Tujuan Pembangunan Milenium (MDG's)

Tujuan utama kebijakan nasional serta strategi nasional pembangunan sebagai bagian dari upaya untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (MDG's) adalah meningkatnya jumlah pekerja penuh (*full employment*) dan produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua. Pekerjaan yang layak dan produktif bagi semua merupakan isu sentral untuk mengatasi kemiskinan dan kelaparan, MDG pertama memasukkan target baru (disepakati pada tahun 2008) yaitu "mencapai pekerja penuh dan layak bagi semua, termasuk perempuan dan orang-orang muda". Empat indikator yang dipilih untuk memantau kemajuan menuju sasaran 1b dalam MDGs tersedia dalam KILM, yaitu rasio penduduk bekerja terhadap total penduduk (*Employment to Population Ratio/EPR*), proporsi pekerja yang hidup di bawah garis kemiskinan, tingkat pekerja rentan (*vulnerable employment*), dan tingkat pertumbuhan produktivitas tenaga kerja, sesuai dengan indikator KILM 2, 3, 18 dan 20.

Memantau kesetaraan gender di pasar tenaga kerja

Wanita menghadapi tantangan khusus dalam mencapai pekerjaan yang layak. Sebagian besar indikator KILM dipisahkan menurut jenis kelamin, yang memungkinkan untuk melakukan perbandingan kesempatan kerja laki-laki dan perempuan.

Mengkaji tenaga kerja di era globalisasi

Globalisasi memiliki potensi manfaat bagi semua, namun sampai saat ini hal tersebut tidak mencakup orang banyak. Oleh karena itu, perlu satu cara untuk menghadapi era globalisasi dengan tetap mendorong penciptaan kesempatan kerja yang layak untuk semua. Salah satu cara untuk melakukannya adalah membuat tenaga kerja menjadi tujuan sentral dari kebijakan ekonomi makro dan sosial. Indikator KILM dapat bermanfaat dalam hal ini dengan memonitor dinamika kerja yang terkait dengan globalisasi. Misalnya, ada penelitian yang menunjukkan bahwa kehilangan pekerjaan/penciptaan serta perubahan upah dan produktivitas dipengaruhi oleh globalisasi. Jika indikator mencerminkan konsekuensi negatif dari globalisasi, maka pembuat kebijakan memiliki pilihan untuk mengubah

kebijakan ekonomi makro sehingga dapat meminimalkan biaya penyesuaian dan mendistribusikan keuntungan dari globalisasi secara lebih adil.

1.2. Analisis Pasar Tenaga Kerja Menggunakan KILM

Semakin banyak negara yang mempublikasikan angka pengangguran nasional dan data ketenagakerjaan agregat. Namun, pengguna harus bijaksana menggunakan statistik ini dalam rangka melihat dinamika pasar tenaga kerja. Salah satu keuntungan menggunakan tingkat pengangguran agregat, misalnya, relatif lebih mudahnya dalam hal pengumpulan dan komparasi antar daerah. Tetapi, melihat angka pengangguran saja dengan mengabaikan unsur-unsur lain dari pasar tenaga kerja yang lain merupakan suatu kekeliruan. Adalah penting untuk menyadari pengangguran sebagai salah satu aspek status tenaga kerja. Oleh karena itu, langkah pertama dalam analisis pasar kerja, adalah menentukan rincian status tenaga kerja dalam populasi. Penduduk usia kerja dapat didekomposisi menjadi orang-orang yang tidak aktif (di luar tenaga kerja/bukan angkatan kerja, KILM 13), bekerja (KILM 2) atau tidak bekerja dan mencari pekerjaan (menganggur, KILM 8). Semakin besar penduduk yang termasuk dalam kelompok pengangguran atau bukan angkatan kerja, atau keduanya, menunjukkan underutilisasi yang besar dari angkatan kerja yang potensial. Pemerintah yang menghadapi situasi ini semestinya berusaha untuk menganalisis alasan untuk tidak aktif, yang pada gilirannya bisa menentukan pilihan kebijakan yang penting untuk mengubah situasi.

Jika mayoritas penduduk aktif terdiri dari perempuan yang tidak bekerja karena mereka memiliki tanggung jawab rumah tangga, pemerintah mungkin ingin mendorong lingkungan yang memfasilitasi partisipasi ekonomi perempuan melalui, misalnya, pembentukan pusat-pusat penitipan anak atau jam kerja fleksibel bagi perempuan. Atau, program untuk menggalakkan pekerjaan pada penyandang cacat dapat membantu menurunkan tingkat ketidakaktifan, jika cacat adalah alasan umum untuk tidak aktif. Hal yang lebih sulit adalah mengembalikan orang yang telah meninggalkan pasar kerja ke dalam angkatan kerja karena alasan "putus asa"/*discourage worker*, yaitu karena mereka merasa bahwa tidak ada pekerjaan yang sesuai yang tersedia bagi mereka, dan mereka tidak

memiliki kualifikasi yang tepat, atau karena mereka tidak tahu ke mana harus mencari pekerjaan.

Pengangguran juga harus dianalisis menurut jenis kelamin (KILM 8), usia (KILM 9), lamanya menganggur (KILM 10) dan tingkat pendidikan (KILM 11) untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari komposisi pengangguran sehingga bisa menentukan kebijakan pengangguran yang tepat. Karakteristik lain dari pengangguran yang tidak ditampilkan dalam KILM, seperti latar belakang sosial-ekonomi, pengalaman kerja, dll, juga penting untuk dianalisa, jika data karakteristik tersebut tersedia, untuk menentukan kelompok mana yang menghadapi kesulitan tertentu. Paradoksnya, tingkat pengangguran yang rendah mungkin menyamarkan tingkat kemiskinan dalam suatu Negara (KILM 20), sedangkan tingkat pengangguran tinggi dapat terjadi di negara-negara dengan perkembangan ekonomi yang signifikan dengan insiden kemiskinan rendah. Di negara-negara berkembang dengan skema perlindungan sosial atau bila tabungan atau cara lain dukungan yang tersedia, pekerja yang lebih baik mampu untuk meluangkan waktu untuk mencari pekerjaan lebih diinginkan. Oleh karena itu, masalah di banyak negara berkembang bukanlah tingkat pengangguran yang tinggi, melainkan kurangnya kesempatan kerja yang layak dan produktif bagi mereka yang bekerja. Hal ini membawa kita pada kebutuhan untuk membedah jumlah total lapangan kerja serta untuk menilai kesejahteraan penduduk yang bekerja, di bawah premis bahwa tidak semua pekerjaan adalah "pekerjaan yang layak". Jika penduduk yang bekerja terdiri dari sebagian besar bekerja sendiri atau pekerja keluarga (lihat KILM 3), lalu, dengan total penduduk yang bekerja (KILM 2) akan kehilangan nilainya sebagai ukuran normatif. Apakah orang-orang ini bekerja? Ya, menurut definisi internasional. Apakah mereka dalam pekerjaan yang layak? Mungkin tidak. Meskipun secara teknis bekerja, beberapa pekerja yang berusaha sendiri atau pekerja keluarga akan bertahan pekerjaan mereka saat ini sehingga batas antara bekerja dan menganggur sangat tipis.

Jika dan ketika terbuka lowongan untuk pekerjaan yang bergaji (buruh/karyawan/pegawai) di ekonomi formal, rombongan tenaga kerja ini akan berlomba-lomba untuk mengajukan lamaran. Identifikasi lebih

lanjut harus dilakukan untuk menentukan apakah pekerja tersebut umumnya miskin (KILM 20), terlibat dalam kegiatan pertanian tradisional (KILM 4), menjual barang-barang di pasar informal tanpa keamanan kerja (KILM 7), jam kerja yang berlebihan (KILM 6) atau ingin menambah jam kerja (KILM 12).

1.3. Struktur Publikasi

Publikasi ini merupakan publikasi dengan struktur publikasi KILM (*Key Indicator of Labor Market*) yang disusun ILO. Tetapi, karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan dalam SAKERNAS, tidak semua indikator KILM dapat ditampilkan dalam publikasi ini. Selain karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan, beberapa KILM juga memerlukan data lintas sektor (misal : PDB sektoral). Berikut adalah struktur publikasi KILM berdasarkan SAKERNAS Februari 2011.

Ringkasan Eksekutif

Bab 1 : Pendahuluan

Bab 2: Penjelasan Teknis

Bab 3: Partisipasi di Dunia Kerja (KILM 1)

KILM 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Bab 4: Indikator Tenaga Kerja (KILM 2-7)

4.1. KILM 2. Rasio Pekerja Terhadap Jumlah Penduduk

4.2. KILM 3. Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

4.3. KILM 4. Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha

4.4. KILM 5. Pekerja Paruh Waktu

4.5. KILM 6. Jam Kerja

4.6. KILM 7. Pekerja Sektor Informal

Bab 5: Indikator Pengangguran, *Underemployment* dan Ketidakaktifan

- 5.1. KILM 8. Pengangguran
- 5.2. KILM 9. Pengangguran Pada Kelompok Usia Muda
- 5.3. KILM 11. Pengangguran dan Pendidikan
- 5.4. KILM 12. Setengah Penganggur
- 5.5. KILM 13. Tingkat Ketidakaktifan

Bab 6: Indikator Pendidikan dan Melek Huruf

- KILM 14. Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf

Lampiran

Akronim

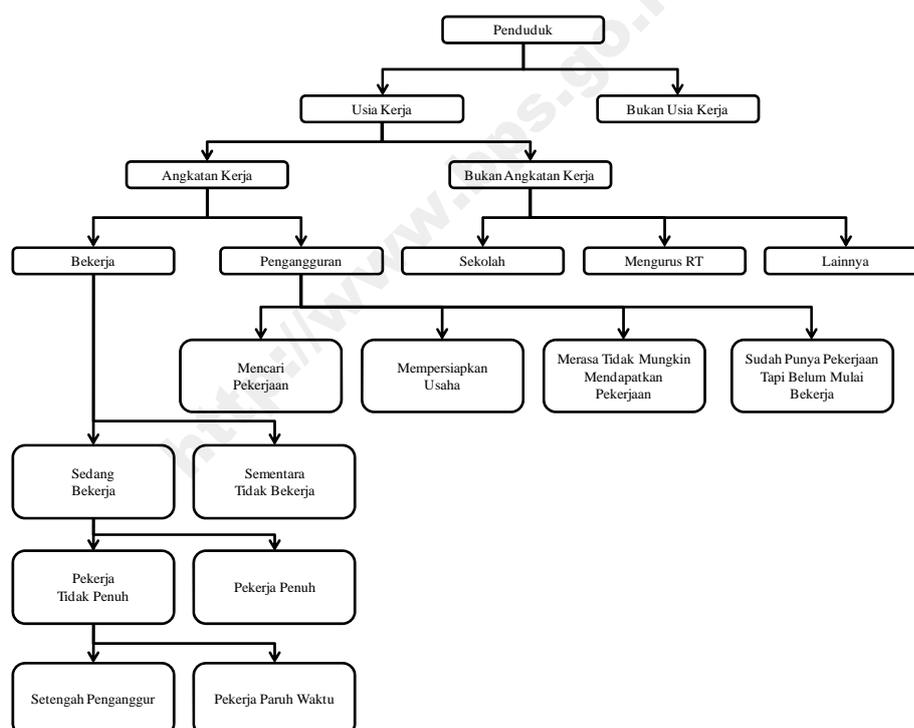
<http://www.bps.go.id>

BAB 2

PENJELASAN TEKNIS

2.1. Penjelasan Umum

Konsep/definisi ketenagakerjaan yang digunakan BPS merujuk pada rekomendasi *International Labor Organization* (ILO) sebagaimana tercantum dalam buku ***“Surveys of Economically Active Population, Employment, Unemployment and Under employment”*** *An ILO Manual on Concepts and Methods, ILO 1992*. Hal ini dimaksudkan terutama agar data ketenagakerjaan yang dihasilkan dari berbagai survei di Indonesia dapat dibandingkan secara internasional, tanpa mengesampingkan kondisi ketenagakerjaan spesifik Indonesia.



2.2. Konsep Umum

Penduduk

Semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

Usia Kerja

Indonesia menggunakan batas bawah usia kerja (*economically active population*) 15 tahun (meskipun dalam survei dikumpulkan informasi mulai dari usia 10 tahun) dan tanpa batas atas usia kerja.

Di negara lain, penentuan batas bawah dan batas atas usia kerja bervariasi sesuai dengan kebutuhan/situasinya. Beberapa contoh:

- Batas bawah: Mesir (6 tahun), Brazil (10 tahun), Swedia, USA (16 tahun), Kanada (14 dan 15 tahun), India (5 dan 15 tahun), Venezuela (10 dan 15 tahun).
- Batas atas: Denmark, Swedia, Norwegia, Finlandia (74 tahun), Mesir, Malaysia, Mexico (65 tahun), banyak negara seperti Indonesia tidak ada batas atas.

Periode referensi

Dalam survei rumah tangga atau individu, periode referensi yang pendek (*a short recent reference period*) akan meminimumkan kesalahan responden dalam mengingat (*recall*) dan juga mengurangi masalah (statistik) yang timbul oleh karena perpindahan penduduk dan perubahan status aktivitas, pekerjaan dan karakteristik penduduk lainnya.

Standar internasional untuk periode referensi yang pendek adalah satu hari atau satu minggu. Periode referensi satu minggu (yang lalu) paling banyak diterapkan di negara-negara yang melaksanakan survei angkatan kerja nasional, termasuk Indonesia.

Kriteria Satu Jam

Kriteria satu jam digunakan dengan pertimbangan untuk mencakup semua jenis pekerjaan yang mungkin ada pada suatu negara, termasuk di dalamnya adalah pekerjaan dengan waktu singkat (*short-time work*), pekerja bebas, *stand-by work* dan pekerjaan yang tak beraturan lainnya.

Kriteria satu jam juga dikaitkan dengan definisi bekerja dan penganggur yang digunakan, di mana penganggur adalah situasi dari ketiadaan pekerjaan secara total (*lack of work*) dari jumlah jam kerja dinaikkan maka akan mengubah definisi penganggur yaitu bukan lagi ketiadaan pekerjaan secara total.

Di samping itu, juga untuk memastikan bahwa pada suatu tingkat agregasi tertentu input tenaga kerja total berkaitan langsung dengan produksi total. Hal ini diperlukan terutama ketika dilakukan *joint analysis* antara statistik ketenagakerjaan dan statistik produksi.

Berdasarkan argumen teknis, ILO merekomendasikan untuk memperhatikan *the one hour criterion*, yaitu digunakannya konsep/definisi satu jam dalam periode referensi tertentu untuk menentukan seseorang dikategorikan sebagai *employed* (bekerja). BPS menggunakan konsep/definisi "bekerja paling sedikit 1 jam dalam seminggu yang lalu" untuk mengkategorikan seseorang (*currently economically active population*) sebagai bekerja, tanpa melihat lapangan usaha, jabatan, maupun status pekerjaannya.

2.3. Indikator Kunci Pasar Tenaga Kerja

Organisasi Perburuhan Internasional (*International Labour Organization-ILO*) meluncurkan Indikator Kunci Pasar Tenaga Kerja/KILM (*Key Indicator of Labor Market*) pada tahun 1999 untuk melengkapi program reguler pengumpulan data dan untuk meningkatkan penyebaran data pada elemen kunci dari pasar tenaga kerja dunia.

Terdapat 20 (dua puluh) indikator yang disusun oleh ILO yang dikelompokkan ke dalam 8 (delapan) kelompok, yaitu:

1. Partisipasi di dunia kerja, yang terdiri dari KILM 1, yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja;
2. Indikator pekerja, terdiri dari KILM 2 (rasio pekerja terhadap jumlah penduduk), KILM 3 (penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan utama), KILM 4 (lapangan usaha tenaga kerja), KILM 5 (pekerja paruh waktu), KILM 6 (jam kerja) dan KILM 7 (tenaga kerja di ekonomi informal);
3. Indikator pengangguran, *underemployment* dan ketidakaktifan, yang terdiri dari KILM 8 (pengangguran), KILM 9 (pengangguran pada kelompok pemuda), KILM 10 (pengangguran jangka panjang), KILM 11 (pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan), KILM 12 (*under employment*), dan KILM 13 (tingkat ketidakaktifan);
4. Indikator pendidikan dan melek huruf, yang terdiri dari KILM 14 (pencapaian pendidikan dan melek huruf);
5. Indikator upah dan biaya tenaga kerja, yang terdiri dari KILM 15 (indeks upah sektor manufaktur), KILM 16 (indikator upah dan pendapatan berdasarkan jabatan) dan KILM 17 (upah per jam);
6. Produktifitas Tenaga Kerja yang terdiri dari KILM 18 (produktifitas tenaga kerja);
7. Indikator elastisitas tenaga kerja yang termuat dalam KILM 19 (elastisitas tenaga kerja); dan
8. Indikator kemiskinan, pekerja miskin dan distribusi pendapatan yang tertuang dalam KILM 20 (indikator kemiskinan, pekerja miskin dan distribusi pendapatan).

2.3.1. Partisipasi di dunia kerja

KILM 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat aktif di pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan, yang memberikan indikasi ukuran relatif dari pasokan tenaga kerja yang

tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa. Rincian angkatan kerja menurut jenis kelamin dan kelompok umur memberikan profil distribusi penduduk yang aktif secara ekonomi. Secara umum, kegunaan indikator ini adalah untuk mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah dan menunjukkan besaran relatif dan pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk produksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (*labor supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Beberapa konsep yang berkaitan dengan indikator ini adalah sebagai berikut:

Angkatan Kerja

Konsep angkatan kerja merujuk pada kegiatan utama yang dilakukan oleh penduduk usia kerja selama periode tertentu. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan penganggur.

Bukan Angkatan Kerja (BAK)

Penduduk usia kerja yang tidak termasuk angkatan kerja mencakup penduduk yang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya.

Bekerja

Kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan paling sedikit 1 (satu) jam secara tidak terputus selama seminggu yang lalu. Kegiatan bekerja ini mencakup, baik yang sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak bekerja, misalnya karena cuti, sakit dan sejenisnya. Konsep bekerja satu

jam selama seminggu yang lalu juga digunakan oleh banyak negara antara lain Pakistan, Filipina, Bulgaria, Hungaria, Polandia, Romania, Federasi Rusia, dan lainnya.

2.3.2. Indikator Pekerja

KILM 2. Rasio Pekerja Terhadap Jumlah Penduduk/*Employment to Population Ratio (EPR)*

Rasio pekerja terhadap jumlah penduduk (EPR) didefinisikan sebagai proporsi penduduk usia kerja suatu negara yang berstatus bekerja terhadap penduduk usia kerja. Rasio yang tinggi berarti sebagian besar penduduk suatu negara adalah bekerja, sementara rasio rendah berarti bahwa sebagian besar penduduk tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang berhubungan dengan pasar, karena mereka menganggur atau (lebih mungkin) tidak termasuk dalam angkatan kerja yang sering disebut sebagai Bukan Angkatan Kerja (BAK).

Rasio ini memberikan informasi tentang kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja, karena di banyak negara indikator ini menghasilkan analisis yang lebih mendalam dibandingkan dengan tingkat pengangguran. Meskipun secara keseluruhan rasio tinggi biasanya dianggap sebagai positif, indikator ini saja tidak cukup untuk menilai tingkat pekerjaan yang layak atau tingkat defisit pekerjaan yang layak. Indikator tambahan diperlukan untuk menilai isu-isu seperti upah/gaji, jam kerja, lapangan kerja sektor informal, setengah pengangguran dan kondisi kerja. Bahkan, nilai rasio ini bisa tinggi untuk alasan yang tidak selalu positif misalnya, pilihan pendidikan yang terbatas sehingga kaum muda mengambil pekerjaan yang tersedia daripada tinggal di sekolah untuk membangun modal manusia mereka (memilih bekerja demi melanjutkan sekolah/ membiayai sekolah). Untuk alasan ini, sangat disarankan bahwa indikator ini harus ditinjau ulang secara kolektif dalam setiap evaluasi kebijakan tenaga kerja di suatu negara/wilayah.

KILM 3. Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Kategorisasi menurut status pekerjaan dapat membantu dalam memahami dinamika pasar tenaga kerja dan tingkat pembangunan suatu negara. Selama bertahun-tahun, dan dengan kemajuan pembangunan, suatu negara biasanya akan mengharapkan untuk dapat melihat pergeseran pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa, dengan peningkatan pada jumlah pekerja yang digaji (buruh/karyawan/ pegawai) dan penurunan jumlah pekerja keluarga yang sebelumnya berkontribusi/ bekerja di sektor pertanian.

Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Informasi mengenai status dalam pekerjaan yang dikumpulkan dalam Sakernas adalah :

1. Berusaha sendiri.
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar.
3. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar.
4. Buruh/Karyawan/Pegawai.
5. Pekerja bebas di pertanian.
6. Pekerja bebas di nonpertanian.
7. Pekerja keluarga/tak dibayar.

Dalam publikasi ini, pengelompokan status dalam pekerjaan utama adalah sebagai berikut :

1. Penduduk yang bekerja dengan upah/gaji adalah penduduk bekerja dengan status pekerjaan buruh/karyawan/pegawai;
2. Penduduk yang berusaha, terdiri dari :
 - a. Pengusaha, yaitu penduduk bekerja dengan status pekerjaan berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar dan berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar;
 - b. Berusaha Sendiri;
 - c. Pekerja Bebas yang terdiri dari pekerja bebas di pertanian dan non-pertanian;
3. Pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar.

Selain itu, disajikan juga rasio pekerja rentan (*vulnerable employment*) terhadap total penduduk bekerja. Konsep pekerja rentan mengacu pada publikasi KILM-ILO, yaitu penduduk bekerja dengan status dalam pekerjaan utama adalah berusaha sendiri, pekerja bebas baik di pertanian dan non-pertanian, serta pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar.

KILM 4. Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor

Informasi sektoral biasanya berguna untuk mengidentifikasi pergeseran yang besar dalam ketenagakerjaan dan tingkat pembangunan. Dalam buku teks pembangunan ekonomi, tenaga kerja berpindah dari pertanian dan aktifitas tenaga kerja intensif lainnya ke sektor industri dan akhirnya menuju ke sektor jasa-jasa; dalam prosesnya, pekerja berpindah dari desa ke kota.

Bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja. Klasifikasi baku yang digunakan dalam penggolongan lapangan pekerjaan/lapangan usaha adalah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Untuk kepentingan penyajian/publikasi, digunakan kategori/sektor sebagai berikut:

1. Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan;
2. Pertambangan dan penggalian;
3. Industri pengolahan;
4. Listrik, gas dan air;
5. Bangunan;
6. Perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel;
7. Angkutan, pergudangan dan komunikasi;
8. Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan;
9. Jasa kemasyarakatan.

Untuk kepentingan analisis, sektor dalam perekonomian dibagi menjadi 3 (tiga) sektor yaitu A (agriculture)/Pertanian, M(anufacture)/Manufaktur dan S(ervices)/Jasa-Jasa, berdasarkan pada definisi sektor *International Standard Industrial Classification (ISIC) System* (Revisi 2 dan Revisi 3).

KILM 5. Pekerja Paruh Waktu

Jumlah jam kerja berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan pekerja serta pada tingkat produktivitas dan biaya tenaga kerja perusahaan. Mengukur tingkat dan tren di jam-jam bekerja di masyarakat, untuk berbagai kelompok pekerja dan untuk pekerja secara individu menjadi penting ketika melakukan pemantauan kerja dan kondisi hidup maupun ketika menganalisis perkembangan ekonomi. Indikator pekerja paruh waktu berfokus pada individu dengan jumlah jam kerja kurang dari *full time*, sebagai proporsi dari total pekerja. Karena tidak ada definisi yang disepakati secara internasional untuk jumlah minimum jam dalam seminggu yang merupakan pekerjaan penuh-waktu (*full time*), garis pemisah ditentukan baik atas dasar negara-oleh-negara atau melalui penggunaan estimasi khusus. Tetapi, jika tidak ada kesepakatan, biasanya digunakan batas 35 jam seminggu sebagai jam kerja normal. Beberapa negara yang menggunakan batas 35 jam adalah Republik Korea, Amerika dan El Salvador¹. Untuk kasus Indonesia, batas yang digunakan adalah kurang dari 35 jam seminggu dan mencari pekerjaan.

KILM 6. Jam Kerja

Jumlah jam kerja berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan pekerja serta tingkat produktivitas dan biaya tenaga kerja yang dikeluarkan perusahaan. Merupakan sesuatu yang penting untuk mengukur tingkat dan tren di jam-jam bekerja di masyarakat, untuk berbagai kelompok pekerja dan untuk pekerja secara individu, termasuk ketika pemantauan kerja dan kondisi hidup maupun terutama ketika menganalisis perkembangan ekonomi. KILM ini bertujuan untuk menunjukkan jumlah orang yang dipekerjakan menurut jam bekerja (biasanya atau sebenarnya): kurang dari 25 jam kerja per minggu, antara 25 dan 34 jam, antara 35 dan 39 jam, antara 40 dan 48 jam, antara 49 dan 59 jam, 40 jam dan lebih, dan lebih dari 50 jam dan 60 jam dan lebih, sebagaimana data yang tersedia. Sebisa

¹ Hussmanns, R., Mehran, F., Verma, V. *Surveys of economically active population, employment, unemployment and underemployment : An ILO manual in concepts and methods*. Geneva, International Labour Office, 1990.

mungkin data dipecah berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur (total, pemuda dan dewasa) dan status pekerjaan (total, pekerja dengan upah/gaji dan *self-employed*).

KILM 7. Tenaga Kerja Sektor Informal

Pekerja di sektor informal terkait perkiraan jumlah orang yang bekerja di sektor informal dibandingkan dengan jumlah orang bekerja. Dalam hal ukuran dan pertumbuhan, sektor informal merupakan bagian penting dari kehidupan ekonomi, sosial dan politik di sebagian besar negara berkembang, serta beberapa negara maju. Di negara-negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk atau urbanisasi yang tinggi, ekonomi informal cenderung tumbuh untuk menyerap sebagian besar tenaga kerja. Konferensi Internasional Statistik Perburuhan (ICLS) ke-15 mendefinisikan sektor informal sebagai unit produksi dalam usaha rumah tangga yang dimiliki oleh rumah tangga. Mereka yang bekerja di sektor informal terdiri semua orang yang, selama periode acuan tertentu, yang bekerja di setidaknya satu unit produksi yang memenuhi konsep sektor informal, terlepas dari status mereka dalam pekerjaan dan apakah itu mereka utama atau pekerjaan sekunder. Resolusi ICLS memperbolehkan beberapa variasi konsep nasional. Akibatnya, informasi untuk indikator sering didasarkan pada definisi nasional dan pengukuran ekonomi informal.

BPS melakukan pendekatan khusus dalam menentukan pekerja sektor formal/informal, yaitu berdasarkan status dalam pekerjaan utama dan jenis pekerjaan/jabatan².

2.3.3. Indikator Pengangguran, *Underemployment* dan Ketidakaktifan

KILM 8. Pengangguran

Tingkat pengangguran menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari dan bersedia untuk bekerja. Ini tidak boleh disalahartikan sebagai pengukuran kesulitan

² Lihat lampiran untuk matriks penentuan sektor formal/informal

ekonomi, meskipun korelasi sering ada. Definisi baku untuk penganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, dan bersedia untuk bekerja.

Secara spesifik, penganggur terbuka dalam Sakernas, terdiri atas:

1. Mereka yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan;
2. Mereka yang tidak bekerja dan mempersiapkan usaha;
3. Mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan
4. Mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat pengangguran oleh banyak negara digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan. Jika bekerja diambil sebagai situasi yang diinginkan bagi orang-orang dalam populasi yang secara ekonomi aktif (angkatan kerja), maka pengangguran menjadi situasi yang tidak diinginkan. Namun, beberapa pengangguran jangka pendek dapat diinginkan dan diperlukan untuk memastikan penyesuaian terhadap fluktuasi ekonomi. Tingkat pengangguran pada kelompok tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan usia, jenis kelamin, dan pendidikan berguna dalam mengidentifikasi kelompok pekerja dan sektor-sektor yang paling rentan terhadap pengangguran.

Sementara tingkat pengangguran tenaga kerja, dapat dianggap sebagai indikator yang paling informatif yang mencerminkan indikasi pasar umum dan kinerja pasar tenaga kerja dan ekonomi secara keseluruhan, tidak harus ditafsirkan sebagai ukuran kesulitan ekonomi atau kesejahteraan. Bila didasarkan pada standar internasional yang direkomendasikan, tingkat pengangguran hanya memberikan gambaran proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tapi bersedia dan secara aktif mencari pekerjaan. Angka ini menggambarkan tentang sumber daya ekonomi pekerja menganggur atau anggota keluarga mereka. Penggunaannya harus dibatasi sebagai ukuran pemanfaatan tenaga kerja serta indikasi kegagalan untuk mencari pekerjaan. Tindakan-tindakan lain, termasuk indikator pendapatan yang terkait, akan diperlukan untuk mengevaluasi kesulitan ekonomi.

Tingkat pengangguran secara matematis didefinisikan sebagai hasil bagi yang dihasilkan dari membagi jumlah pengangguran (untuk negara atau kelompok pekerja tertentu) dengan jumlah angkatan kerja. Harus ditekankan bahwa itu adalah tenaga kerja atau penduduk yang aktif secara ekonomi yang berfungsi sebagai dasar untuk statistik ini, bukan jumlah penduduk. Perbedaan ini tidak selalu dipahami oleh publik. Memang, istilah "angkatan kerja" dan "bekerja" kadang-kadang keliru digunakan secara bergantian.

KILM 9. Pengangguran Pada Kelompok Pemuda

Tingkat pengangguran memberitahu kita proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari dan tersedia untuk bekerja. Pemuda pengangguran merupakan masalah kebijakan yang penting bagi banyak negara, terlepas dari tahap pembangunan. Untuk tujuan indikator ini, istilah "pemuda" mencakup orang yang berusia 16 sampai 30 tahun³, sedangkan "orang dewasa" didefinisikan sebagai orang yang berusia 31 tahun ke atas.

KILM 10. Pengangguran Jangka Panjang

Tidak dapat disajikan karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan dalam Sakernas.

KILM 11. Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Indikator ini melihat hubungan antara pencapaian pendidikan pekerja dan pengangguran yang memberikan gambaran mengenai perubahan dalam permintaan pekerja. Informasi yang diberikan dapat memiliki implikasi penting bagi pekerja dan kebijakan pendidikan. Jika dikonfirmasi bahwa orang dengan tingkat pendidikan yang rendah berada pada risiko yang lebih tinggi menjadi pengangguran, reaksi politik yang mungkin adalah meningkatkan tingkat pendidikan mereka atau untuk menciptakan lebih banyak pekerjaan dengan keterampilan rendah (*low skilled job*) di dalam

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan

negeri. Cara lainnya, *share* pengangguran yang lebih tinggi di kalangan orang-orang dengan pendidikan tinggi bisa menunjukkan kurangnya pekerjaan teknis yang profesional dan tingkat tinggi. Tabel yang biasanya disajikan menunjukkan distribusi persentase dari total pengangguran suatu negara sesuai dengan lima tingkat sekolah, tingkat pra-dasar, kurang dari satu tahun, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tersier. (Dalam publikasi ini hanya dikategorikan dalam empat tingkat sekolah) sebagai catatan, angka yang ditampilkan bisa berupa distribusi dan bisa berupa *rate*.

KILM 12. Setengah Penganggur

Mereka yang dikategorikan dalam setengah penganggur adalah mereka yang jumlah jam kerjanya di bawah ambang batas jam kerja normal (bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu yang lalu), dengan kondisi :

1. Mereka yang dengan sukarela mencari pekerjaan tambahan yang meliputi:
 - a. Mereka yang menginginkan pekerjaan lain untuk menambah jam kerjanya dari pekerjaannya yang sekarang
 - b. Mereka yang menginginkan mendapat ganti dari pekerjaannya yang sekarang dengan pekerjaan lain yang mempunyai jam kerja lebih banyak.
2. Mereka yang bersedia menerima pekerjaan tambahan

KILM 13. Tingkat Ketidakaktifan

Tingkat ketidakaktifan adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja suatu negara yang tidak terlibat aktif dalam pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan. Tingkat ketidakaktifan yang merupakan proporsi penduduk usia kerja yang tidak termasuk dalam angkatan kerja, jika dijumlahkan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (lihat KILM 1) maka hasilnya adalah 100 persen, dengan perkataan lain tingkat ketidakaktifan sama dengan 1 dikurang TPAK ($1 - \text{TPAK}$).

Dalam beberapa situasi, tingkat ketidakaktifan tinggi untuk kelompok populasi tertentu tidak harus selalu dilihat sebagai "buruk", misalnya, tingkat ketidakaktifan yang relatif tinggi untuk wanita usia 25-34 tahun mungkin karena mereka meninggalkan pasar kerja untuk mengurus keluarga dan melaksanakan tanggung jawab seperti melahirkan anak dan pengasuhan anak. Dengan menggunakan data dalam KILM 13, pengguna dapat melihat sejauh mana ibu berkaitan dengan pola tenaga kerja perempuan. Telah lama diakui bahwa aspek-aspek struktur rumah tangga terkait dengan aktivitas pasar tenaga kerja. Misalnya, perempuan kepala rumah tangga cenderung memiliki tingkat aktivitas yang relatif tinggi. Pada pasangan yang menikah, suami biasanya memiliki tingkat ketidakaktifan yang rendah, terutama jika ada anak-anak dalam keluarga. Tingkat ketidakaktifan yang rendah pada wanita bisa berkorelasi dengan tingginya tingkat ketidakaktifan untuk laki-laki, yaitu suami, jika laki-laki sedang menyelesaikan pendidikan atau secara fisik tidak mampu bekerja, sehingga membuat istri pencari nafkah utama.

2.3.4. Indikator Pendidikan dan Melek Huruf

KILM 14. Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf

Informasi tentang tingkat pencapaian pendidikan saat ini adalah indikator terbaik yang tersedia untuk melihat tingkat keahlian tenaga kerja. Ini adalah faktor penentu penting kemampuan suatu negara untuk bersaing dengan sukses di pasar dunia dan membuat efisiensi penggunaan kemajuan teknologi yang cepat. Tabel KILM 14 menyajikan informasi mengenai tingkat pendidikan angkatan kerja dengan lima tingkat pendidikan yaitu tidak pernah bersekolah, tingkat pra-dasar, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tinggi (Dalam publikasi ini hanya dikategorikan dalam empat tingkat pendidikan, yaitu tidak pernah bersekolah, tingkat dasar, tingkat menengah dan tingkat tinggi).

Kategori yang digunakan dalam indikator secara konseptual berdasarkan tingkat Standar Internasional Klasifikasi Pendidikan (ISCED-

97). Pengelompokan tingkat pendidikan berdasarkan ISCED-97 adalah sebagai berikut :

1. Tidak pernah bersekolah adalah mereka yang tidak/belum pernah bersekolah sama sekali;
2. Sekolah dasar, yaitu mereka yang memiliki pendidikan tidak/belum tamat SD, SD/Ibtidaiyah, Paket A, SMP/Tsanawiyah, SMP Kejuruan dan Paket B;
3. Sekolah menengah, yaitu mereka dengan pendidikan SMA/Aliyah, SMK, Paket C; dan
4. Sekolah tinggi, yaitu mereka yang memiliki ijazah Diploma I/II, Diploma III, Diploma IV/Sarjana dan S2/S3.

2.3.5. Indikator Upah dan Biaya Tenaga Kerja

KILM 15. Indeks Upah Sektor Manufaktur

Tidak dapat disajikan karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan dalam Sakernas.

KILM 16. Indikator Upah dan Pendapatan Berdasarkan Jabatan

Tidak dapat disajikan karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan dalam Sakernas.

KILM 17. Upah Per Jam

Tidak dapat disajikan karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan dalam Sakernas.

2.3.6. Produktifitas Tenaga Kerja

KILM 18. Produktifitas Tenaga Kerja

Tidak dapat disajikan karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan dalam Sakernas.

2.3.7. Indikator Elastisitas Tenaga Kerja

KILM 19. Elastisitas Tenaga Kerja

Tidak dapat disajikan karena keterbatasan variable yang dikumpulkan dalam Sakernas.

2.3.8. Indikator Kemiskinan, Pekerja Miskin dan Distribusi Pendapatan

KILM 20. Indikator Kemiskinan, Pekerja Miskin dan Distribusi Pendapatan

Tidak dapat disajikan karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan dalam Sakernas.

<http://www.bps.go.id>

BAB 3

PARTISIPASI DI DUNIA KERJA (KILM 1)**KILM 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**

TPAK adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat secara aktif di pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja, mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha. Ukuran ini merupakan indikasi relatif dari pasokan tenaga kerja tersedia yang terlibat dalam produksi barang dan jasa. Data angkatan kerja menurut jenis kelamin dan kelompok umur memberikan profil distribusi penduduk yang aktif secara ekonomi.

TPAK dihitung dengan menyatakan jumlah orang dalam angkatan kerja sebagai persentase dari penduduk usia kerja. Angkatan kerja adalah jumlah orang yang bekerja ditambah jumlah pengangguran. Penduduk usia kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang ditentukan untuk pengukuran karakteristik ekonomi¹.

Tabel publikasi standar yang dikeluarkan ILO (KILM 6th ed) menyajikan estimasi tingkat partisipasi angkatan kerja menurut jenis kelamin menurut kelompok umur dengan standar sebagai berikut: 15+, 15–24, 15–64, 25–54, 25–34, 35–54, 55–64 dan 65 tahun ke atas. Penggunaan kelompok umur ini digunakan di lebih dari 190 negara selama tahun 1980 sampai 2010.

TPAK di Indonesia pada Februari 2011 sebesar 69,96 persen, TPAK laki-laki jauh lebih tinggi dibanding TPAK perempuan, masing-masing 84,86 persen dan 55,13 persen. Hal ini juga terjadi pada setiap kelompok umur, TPAK laki-laki pada kelompok usia muda (15–24 tahun) sebesar 59,81 persen, sedangkan TPAK perempuan pada kelompok usia yang sama sebesar 40,64 persen. Sementara itu, TPAK laki-laki pada kelompok usia produktif (15–64 tahun) mencapai 86,67 persen sedangkan TPAK

¹ Lihat bab 2 untuk penjelasan teknis rincian ini

perempuan sebesar 57,30 persen. TPAK tertinggi terdapat pada kelompok usia 35 - 54 tahun baik pada TPAK laki-laki maupun perempuan yaitu 97,80 persen dan 66,84 persen. Bila dibandingkan menurut perbedaan wilayah, TPAK daerah perdesaan lebih tinggi daripada perkotaan, masing-masing sebesar 72,35 persen dan 67,60 persen.

Sementara itu TPAK tertinggi menurut pengelompokan pulau di Indonesia adalah TPAK Pulau Lainnya (Pulau Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua) dengan TPAK sebesar 74,68 persen; diikuti Pulau Kalimantan dengan TPAK sebesar 71,67 persen; Pulau Sumatra dengan TPAK sebesar 70,70 persen; Pulau Jawa dengan TPAK sebesar 69,19 persen; dan Pulau Sulawesi dengan TPAK sebesar 67,75 persen.

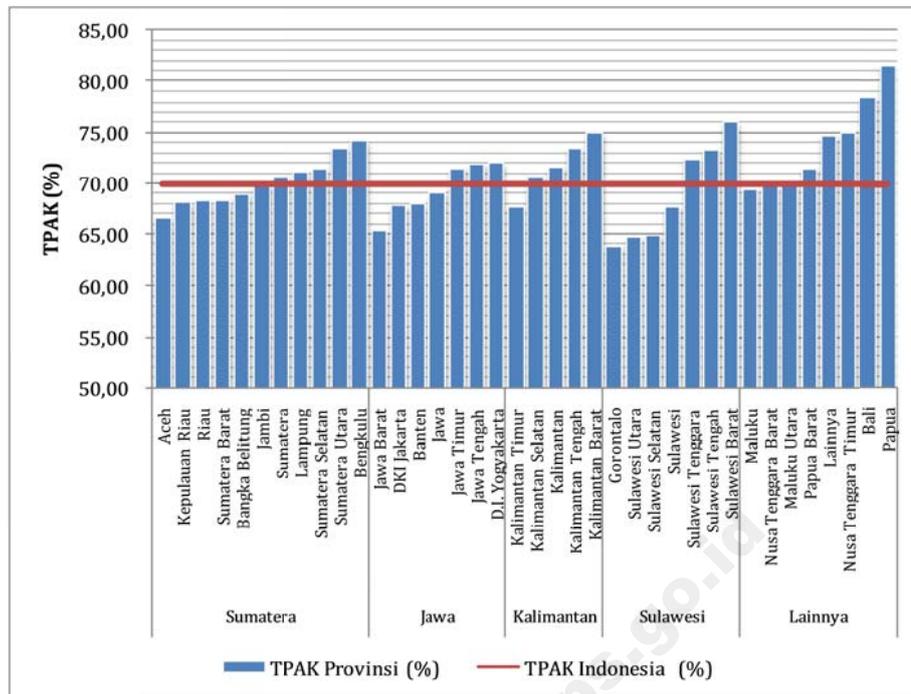
Tabel 3.1. TPAK Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin,
Februari 2011

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk (Juta)			Angkatan Kerja (Juta)			TPAK (%)		
	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
15 - 24	20,58	20,34	40,92	12,31	8,27	20,58	59,81	40,64	50,28
15 - 64	79,83	79,00	158,83	69,19	45,27	114,46	86,67	57,30	72,06
25 - 54	51,73	51,24	102,96	50,43	32,78	83,21	97,48	63,98	80,81
25 - 34	20,81	20,82	41,63	20,19	12,45	32,64	97,02	59,81	78,41
35 - 54	30,92	30,41	61,33	30,24	20,33	50,56	97,80	66,84	82,44
55 - 64	7,52	7,42	14,94	6,46	4,22	10,67	85,82	56,86	71,44
65+	5,33	6,50	11,83	3,07	1,87	4,94	57,62	28,80	41,78
15+	85,16	85,50	170,66	72,26	47,14	119,40	84,86	55,13	69,96

Tabel 3.2. TPAK Menurut Kelompok Umur dan Daerah Tempat Tinggal,
Februari 2011

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk (Juta)			Angkatan Kerja (Juta)			TPAK (%)		
	K	D	Total	K	D	Total	K	D	Total
15 - 24	21,45	19,48	40,92	10,51	10,07	20,58	48,98	51,71	50,28
15 - 64	80,79	78,04	158,83	56,26	58,20	114,46	69,64	74,58	72,06
25 - 54	52,52	50,44	102,96	41,40	41,80	83,21	78,84	82,87	80,81
25 - 34	21,97	19,67	41,63	17,11	15,54	32,64	77,88	79,00	78,41
35 - 54	30,55	30,78	61,33	24,30	26,27	50,56	79,53	85,34	82,44
55 - 64	6,82	8,12	14,94	4,35	6,33	10,67	63,74	77,91	71,44
65+	4,91	6,92	11,83	1,68	3,26	4,94	34,16	47,19	41,78
15+	85,70	84,95	170,66	57,94	61,46	119,40	67,60	72,35	69,96

Grafik: 3.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Provinsi, Februari 2011



BAB 4

INDIKATOR TENAGA KERJA (KILM 2-7)**4.1. KILM 2. Rasio Pekerja Terhadap Jumlah Penduduk**

Rasio pekerja terhadap jumlah penduduk didefinisikan sebagai proporsi penduduk usia kerja suatu negara yang berstatus bekerja terhadap penduduk usia kerja. Rasio yang tinggi berarti sebagian besar penduduk suatu negara adalah bekerja, sementara rasio rendah berarti sebagian besar penduduk tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang berhubungan dengan pasar, karena mereka menganggur atau (lebih mungkin) tidak termasuk dalam angkatan kerja (BAK).

Rasio ini memberikan informasi tentang kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja, karena, di banyak negara, indikator ini menghasilkan analisis yang lebih mendalam dibandingkan dengan tingkat pengangguran. Meskipun secara keseluruhan rasio tinggi biasanya dianggap sebagai positif, indikator ini saja tidak cukup untuk menilai tingkat pekerjaan yang layak atau tingkat defisit pekerjaan yang layak. Indikator tambahan diperlukan untuk menilai isu-isu seperti upah/gaji, jam kerja, lapangan kerja sektor informal, setengah pengangguran dan kondisi kerja. Bahkan nilai rasio ini bisa tinggi untuk alasan yang tidak selalu positif, misalnya, pilihan pendidikan yang terbatas sehingga kaum muda mengambil pekerjaan yang tersedia daripada tinggal di sekolah untuk membangun modal manusia mereka (memilih bekerja demi melanjutkan sekolah/membiayai sekolah).

Secara nasional, rasio pekerja terhadap jumlah penduduk usia kerja pada Februari 2011 mencapai 65,21 Artinya dari 100 orang penduduk yang berusia 15 tahun ke atas, 65 orang diantaranya bekerja. Rasio pekerja laki-laki terhadap jumlah penduduk laki-laki usia kerja lebih tinggi dari pada rasio pekerja perempuan terhadap jumlah penduduk perempuan usia kerja, masing-masing sebesar 79,41 dan 51,06.

Sementara itu pada kelompok penduduk usia muda (15 - 24 tahun) rasio ini mencapai 38,25, sedangkan pada usia 25 tahun ke atas mencapai 73,71.

Bila dibandingkan menurut wilayah, daerah perdesaan menunjukkan rasio yang lebih tinggi daripada daerah perkotaan, masing-masing sebesar 68,94 dan 61,50.

Menurut pengelompokan beberapa pulau, nilai tertinggi indikator ini terdapat pada kelompok Pulau Lainnya (Pulau Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua) sebesar 71,55; Pulau Kalimantan sebesar 67,21; Pulau Sumatra sebesar 66,21; Pulau Jawa sebesar 64,02; dan Pulau Sulawesi sebesar 63,73.

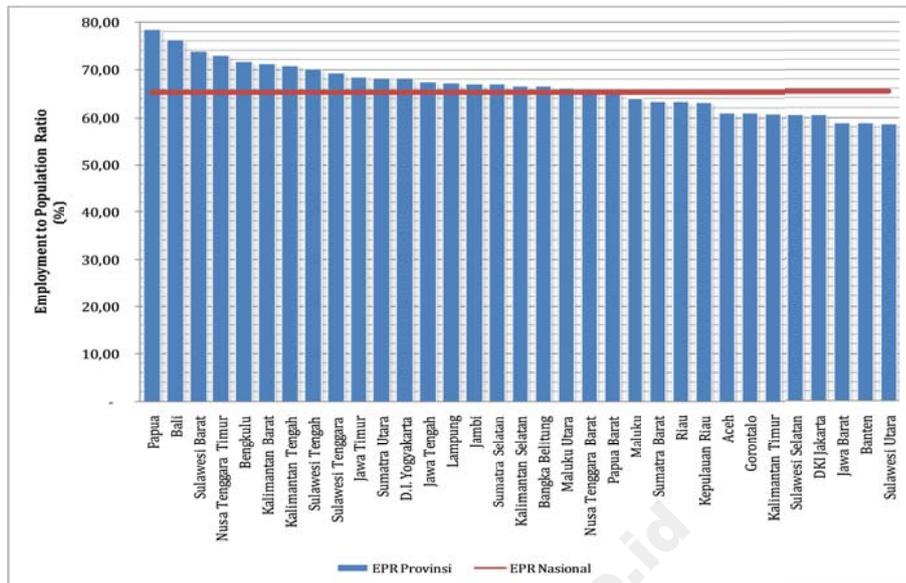
Tabel 4.1 Rasio Penduduk Bekerja Terhadap Total Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Februari 2011

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk (Juta)			Jumlah Penduduk Bekerja (Juta)			EPR (%)		
	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
Penduduk Usia Muda (15 - 24)	20,58	20,34	40,92	9,48	6,18	15,65	46,05	30,37	38,25
Penduduk Dewasa (25+)	64,58	65,16	129,73	58,15	37,48	95,63	90,04	57,52	73,71
Total	85,16	85,50	170,66	67,62	43,66	111,28	79,41	51,06	65,21

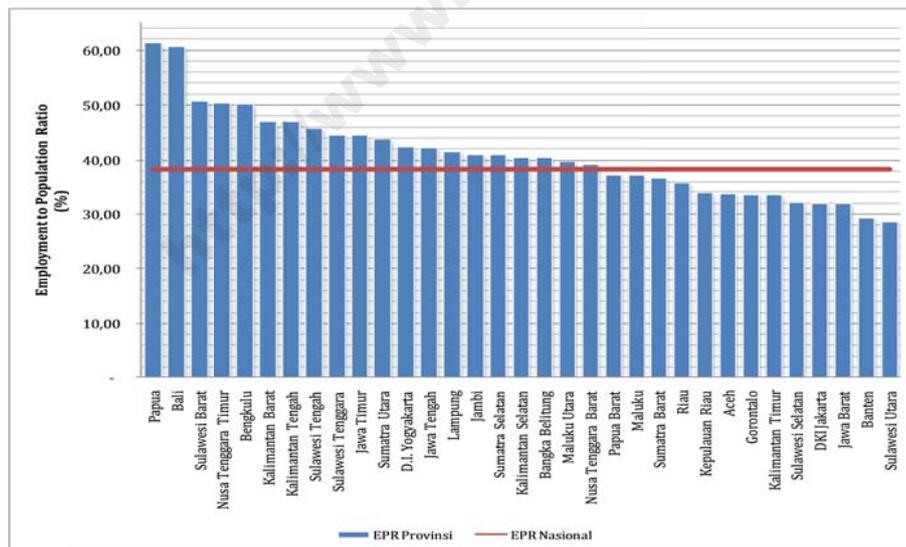
Tabel 4.2 Rasio Penduduk Bekerja Terhadap Total Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Klasifikasi Daerah, Februari 2011

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk (Juta)			Jumlah Penduduk Bekerja (Juta)			EPR (%)		
	K	D	K+D	K	D	K+D	K	D	K+D
Penduduk Usia Muda (15 - 24)	21,45	19,48	40,92	7,43	8,23	15,65	34,63	42,24	38,25
Penduduk Dewasa (25+)	64,25	65,48	129,73	45,28	50,35	95,63	70,47	76,89	73,71
Total	85,70	84,95	170,66	52,71	58,57	111,28	61,50	68,94	65,21

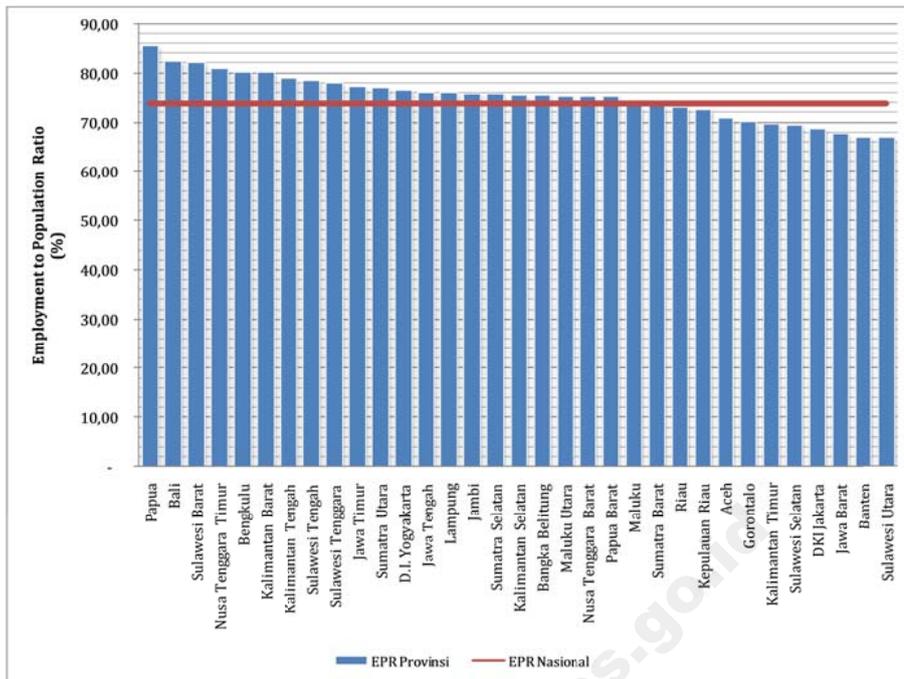
Grafik 4.1. Rasio Penduduk Bekerja Terhadap Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas, Februari 2011



Grafik 4.2. Rasio Penduduk Usia Muda (15-24) yang Bekerja Terhadap Total Penduduk Usia Muda, Februari 2011



Grafik 4.3. Rasio Penduduk Dewasa (25+) yang Bekerja Terhadap Total Penduduk Dewasa, Februari 2011



4.2. KILM 3. Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Kategorisasi menurut status pekerjaan dapat membantu dalam memahami dinamika pasar tenaga kerja dan tingkat pembangunan suatu negara. Dengan kemajuan pembangunan, suatu negara biasanya akan mengharapkan untuk melihat pergeseran pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa, dengan peningkatan pada jumlah pekerja yang digaji (buruh/karyawan/pegawai), dan penurunan jumlah pekerja keluarga yang sebelumnya berkontribusi/bekerja di sektor pertanian. Kategori Status Pekerjaan Utama pada publikasi ini dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu :

1. Pekerja dengan upah dan gaji.
2. Pekerja yang berusaha sendiri.
3. Pekerja keluarga masing-masing yang dinyatakan sebagai proporsi dari total bekerja.

Penduduk yang bekerja berstatus buruh/karyawan/pegawai menerima upah/gaji mencapai 31,01 persen, sedangkan penduduk yang berstatus berusaha dibantu buruh tetap atau pengusaha hanya sebesar 3,23 persen. Persentase penduduk perempuan yang bekerja sebagai pekerja keluarga masih relatif tinggi yaitu sebesar 33,93 persen.

Di daerah perkotaan, sebagian besar penduduknya bekerja dengan upah/gaji dengan persentase mencapai 46,07 persen. Sedangkan di daerah perdesaan didominasi oleh mereka yang berstatus sebagai pekerja yang berusaha sendiri dengan persentase sebesar 42,85 persen. Sementara itu, secara nasional, pada Februari 2011, rasio penduduk bekerja yang tergolong "pekerja rentan/*vulnerable employment*"¹ terhadap total penduduk yang bekerja mencapai 65,76 persen.

¹ Pekerja rentan adalah pekerja dengan status berusaha sendiri, pekerja bebas (pertanian dan non-pertanian), serta pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar.

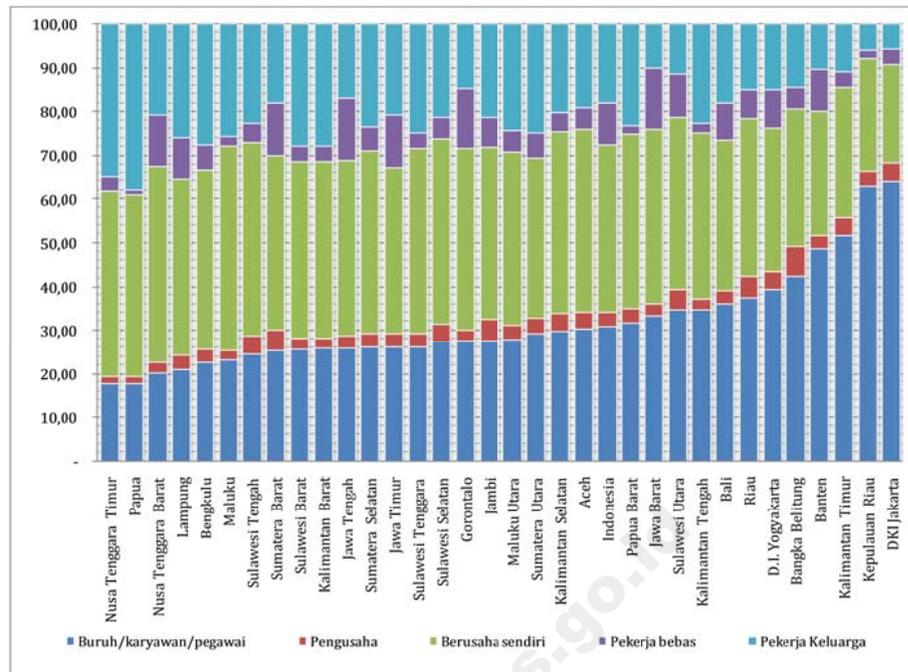
Tabel 4.3. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Dalam Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, Februari 2011

Status Dalam Pekerjaan Utama		Laki-Laki	Perempuan	Total
Penduduk yang bekerja dengan upah/gaji	(%)	32,86	28,15	31,01
Penduduk yang berusaha	(%)	59,49	37,92	51,03
(a) Pengusaha	(%)	4,31	1,56	3,23
(b) Berusaha sendiri	(%)	43,61	29,71	38,15
(c) Jumlah pekerja bebas	(%)	11,58	6,66	9,65
Pekerja Keluarga	(%)	7,64	33,93	17,96
Rasio penduduk bekerja "rentan" terhadap total penduduk yang bekerja	(%)	62,82	70,29	65,76

Tabel 4.4. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Dalam Pekerjaan Utama dan Klasifikasi Daerah, Februari 2011

Status Dalam Pekerjaan Utama		Kota	Desa	Total
Penduduk yang bekerja dengan upah/gaji	(%)	46,07	17,47	31,01
Penduduk yang berusaha	(%)	44,48	56,93	51,03
(a) Pengusaha	(%)	4,04	2,50	3,23
(b) Berusaha sendiri	(%)	32,94	42,85	38,15
(c) Jumlah pekerja bebas	(%)	7,50	11,58	9,65
Pekerja Keluarga	(%)	9,45	25,61	17,96
Rasio penduduk bekerja "rentan" terhadap total penduduk yang bekerja	(%)	49,89	80,03	65,76

Grafik 4.4. Proporsi Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Provinsi, Februari 2011



4.3. KILM 4. Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha

Informasi sektoral atau lapangan usaha biasanya berguna untuk mengidentifikasi pergeseran yang besar dalam ketenagakerjaan dan tingkat pembangunan. Dalam buku teks pembangunan ekonomi, tenaga kerja berpindah dari pertanian dan aktifitas tenaga kerja intensif lainnya ke sektor industri dan akhirnya menuju ke sektor jasa-jasa; dalam prosesnya, pekerja berpindah dari desa ke kota.

Untuk kepentingan analisis, sektor dalam perekonomian dibagi menjadi 3 (tiga) sektor yaitu *Agriculture*, *Manufacture* dan *Services*, berdasarkan pada definisi sektor *International Standard Industrial Classification (ISIC) System (Revision 2 and Revision 3)*.

Hasil Sakernas Februari 2011 menunjukkan bahwa di Indonesia, sektor pertanian mulai digeser oleh sektor jasa. Hal ini ditunjukkan secara sektoral oleh proporsi jumlah penduduk yang bekerja pada Sektor Jasa-Jasa sebesar 43,05 persen sedangkan Sektor Pertanian mencapai 38,17 persen dan Sektor Manufaktur sebesar 18,78 persen. Apabila diuraikan lebih lanjut, Sektor Perdagangan menjadi penyumbang terbesar tingginya persentase penduduk yang bekerja di Sektor Jasa-Jasa, selain ditunjang oleh Sektor Jasa Kemasyarakatan dan Sektor Angkutan. Sedangkan persentase Sektor Industri dan Bangunan menjadi penyumbang terbesar Sektor Manufaktur dengan persentase masing-masing sebesar 12,31 dan 5,02.

Ditinjau dari sisi pekerja, pekerja laki-laki yang bekerja di Sektor Jasa-Jasa menunjukkan persentase sedikit lebih tinggi daripada pekerja laki-laki yang bekerja di Sektor Pertanian, sedangkan pada pekerja perempuan menunjukkan perbedaan yang lebih terlihat dengan persentase 10,17 lebih tinggi bekerja di Sektor Jasa-Jasa daripada di Sektor Pertanian.

Di daerah perkotaan sebesar 62,81 persen penduduk bekerja di Sektor Jasa-Jasa, sedangkan di perdesaan hanya 25,28 persen penduduk yang bekerja di sektor yang sama. Sebaliknya di perdesaan sebesar 60,93 persen penduduk bekerja di Sektor Pertanian, sedangkan di perkotaan hanya mencapai 12,87 persen.

Kondisi dimana Sektor Pertanian masih mendominasi penduduk yang bekerja secara sektoral, tergambar pada kelompok pulau yang mencakup Pulau Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua (Pulau Lainnya) yang mencapai 52,10 persen, di mana Provinsi Papua sebagai penopang terbesar penduduk yang bekerja di sektor tersebut.

Sementara persentase penduduk terbesar yang bekerja di Sektor Manufaktur maupun Jasa-Jasa terdapat di Pulau Jawa, didominasi oleh Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi dengan persentase penduduk yang bekerja di Sektor Manufaktur terbesar di pulau ini, sedangkan di Sektor Jasa-Jasa ditopang oleh Provinsi DKI Jakarta dan Banten.

Tabel 4.5. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin, Februari 2011

Lapangan Usaha		Laki-Laki	Perempuan	Total
Pertanian	(%)	38,27	38,00	38,17
Manufaktur	(%)	21,97	13,83	18,78
Jasa-jasa	(%)	39,75	48,17	43,05

Tabel 4.6. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Klasifikasi Daerah, Februari 2011

Lapangan Usaha		Kota	Desa	Total
Pertanian	(%)	12,87	60,93	38,17
Manufaktur	(%)	24,32	13,79	18,78
Jasa-jasa	(%)	62,81	25,28	43,05

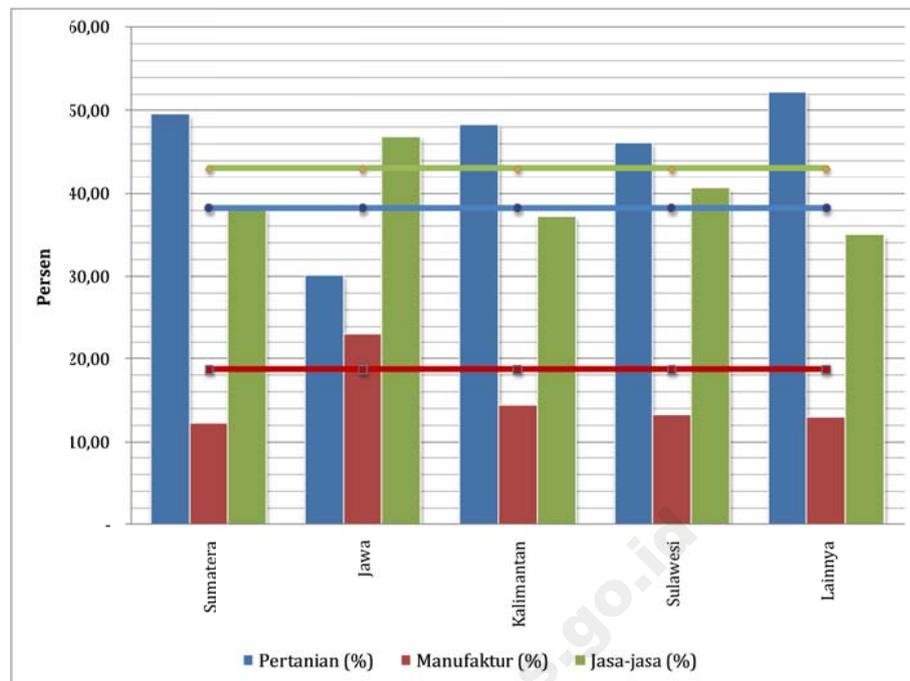
Tabel 4.7. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin, Februari 2011

Lapangan Usaha		Laki-Laki	Perempuan	Total
1 Pertanian	(%)	38,27	38,00	38,17
2 Pertambangan	(%)	1,79	0,33	1,22
3 Industri	(%)	11,78	13,13	12,31
4 Listrik, Gas dan Air	(%)	0,34	0,06	0,23
5 Bangunan	(%)	8,06	0,31	5,02
6 Perdagangan	(%)	16,98	26,94	20,89
7 Angkutan	(%)	7,59	1,03	5,02
8 Keuangan	(%)	2,15	1,38	1,85
9 Jasa Kemasyarakatan	(%)	13,03	18,82	15,30

Tabel 4.8. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Klasifikasi Daerah, Februari 2011

Lapangan Usaha		Kota	Desa	Total
1 Pertanian	(%)	12,87	60,93	38,17
2 Pertambangan	(%)	1,09	1,33	1,22
3 Industri	(%)	16,65	8,40	12,31
4 Listrik, Gas dan Air	(%)	0,40	0,08	0,23
5 Bangunan	(%)	6,18	3,98	5,02
6 Perdagangan	(%)	29,31	13,30	20,89
7 Angkutan	(%)	7,40	2,88	5,02
8 Keuangan	(%)	3,34	0,51	1,85
9 Jasa Kemasyarakatan	(%)	22,76	8,59	15,30

Grafik 4.5. Rasio Penduduk Usia Muda (15-24) yang Bekerja Terhadap Total Penduduk Usia Muda, Februari 2011



4.4. KILM 5. Pekerja Paruh Waktu

Jumlah jam kerja berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan pekerja serta pada tingkat produktivitas dan biaya tenaga kerja perusahaan. Mengukur tingkat dan tren jam kerja di masyarakat untuk berbagai kelompok pekerja dan untuk pekerja secara individu menjadi penting ketika melakukan pemantauan kerja dan kondisi hidup, maupun ketika menganalisis perkembangan ekonomi. Indikator pekerja paruh waktu terfokus pada individu dengan jumlah jam kerja kurang dari *full time*, sebagai proporsi dari total pekerja.

Pada Februari 2011 tingkat pekerja paruh waktu mencapai 16,59 persen yang dapat diartikan bahwa dari 100 orang yang bekerja, terdapat sekitar 17 orang pekerja paruh waktu. Sementara *share* perempuan pada pekerja paruh waktu sebesar 59,28 persen yang berarti bahwa dari 100 pekerja paruh waktu, 59 orang adalah perempuan.

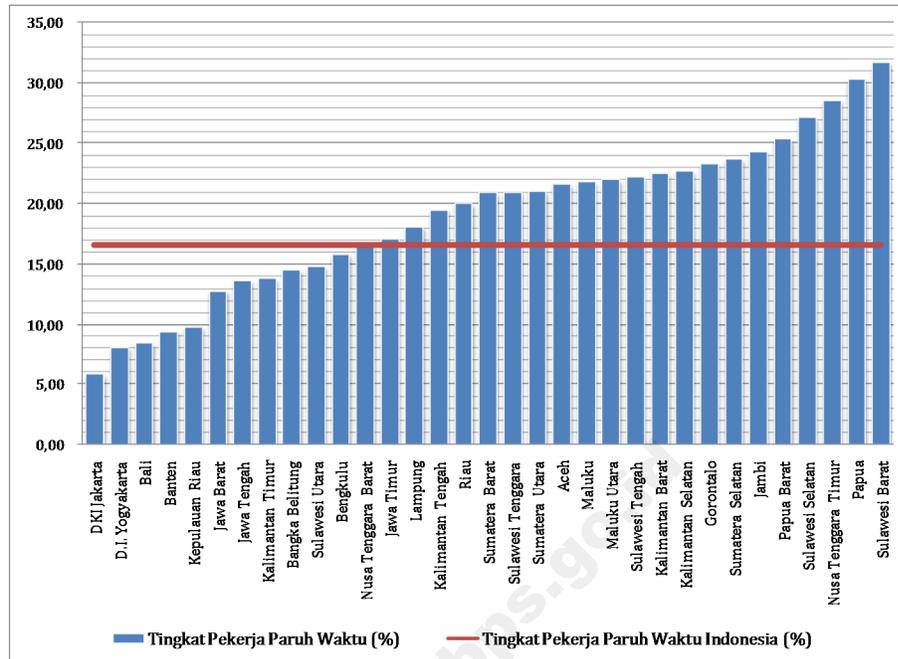
Tingkat pekerja paruh waktu perempuan lebih tinggi daripada tingkat pekerja paruh waktu laki-laki, masing-masing sebesar 25,06 persen dan 11,12 persen.

Sementara itu, jika dilihat menurut daerah, perdesaan memiliki tingkat pekerja paruh waktu 11,96 persen lebih tinggi dibanding daerah perkotaan, masing-masing sebesar 22,25 persen dan 10,29 persen. *Share* perempuan pada pekerja paruh waktu di Pulau Jawa tertinggi bila dibandingkan dengan pulau yang lain yakni mencapai 61,70 persen.

Tabel 4.8. Pekerja Paruh Waktu Menurut Jenis Kelamin,
Februari 2011

Rincian		Laki-Laki	Perempuan	Total
Penduduk Bekerja	Juta	67,62	43,66	111,28
Pekerja paruh waktu	Juta	7,52	10,94	18,46
Tingkat pekerja paruh waktu	(%)	11,12	25,06	16,59
Share Perempuan pada pekerja paruh waktu	(%)	59,28		

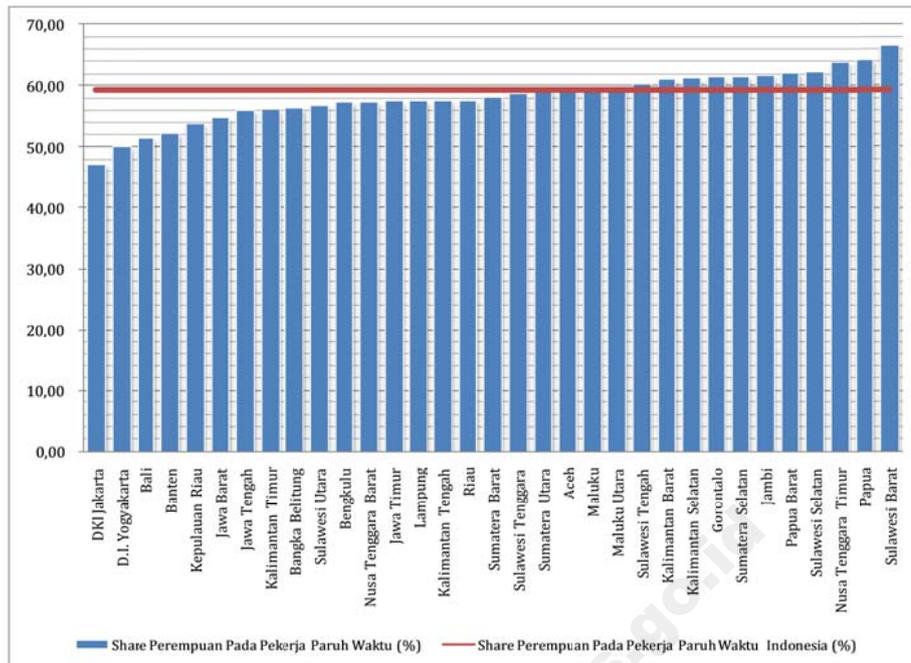
Grafik 4.6. Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi, Februari 2011



Tabel 4.9. Pekerja Paruh Waktu Menurut Klasifikasi Daerah, Februari 2011

Rincian		Kota	Desa	Total
Penduduk Bekerja	Juta	52,71	58,57	111,28
Pekerja paruh waktu	Juta	5,42	13,03	18,46
Tingkat pekerja paruh waktu	(%)	10,29	22,25	16,59
Share Perempuan pada pekerja paruh waktu	(%)	59,28		

Grafik 4.7. Share Perempuan Pada Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi, Februari 2011



4.5. KILM 6. Jam Kerja

KILM ini bertujuan untuk menunjukkan jumlah orang yang dipekerjakan menurut jam bekerja (biasanya atau sebenarnya): kurang dari 25 jam kerja perminggu, antara 25 dan 34 jam, antara 35 dan 39 jam, antara 40 dan 48 jam, antara 49 dan 59 jam, 40 jam ke atas, 50 jam ke atas, dan 60 jam ke atas, sebagaimana data yang tersedia.

Hasil Sakernas Februari 2011 menunjukkan sebagian besar penduduk bekerja di atas 35 jam perminggu dengan persentase sebesar 67,26, sedangkan penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam kerja perminggu mencapai 32,74 persen. Dalam kondisi ini pekerja perempuan yang bekerja di bawah 35 jam perminggu lebih mendominasi dibanding pekerja laki-laki dan terlihat pada hampir setiap pengelompokan jumlah jam kerja 35 jam per minggu ke bawah.

Sementara itu penduduk di daerah perkotaan yang bekerja selama 35 jam ke atas perminggu lebih tinggi 17,26 persen dibanding daerah perdesaan, di mana masing-masing sebesar 76,35 persen dan 59,09 persen. Persentase pekerja dengan jam kerja di atas 35 jam perminggu di Pulau Jawa tertinggi dibanding pulau yang lain dengan persentase sebesar 70,81. Sedangkan Pulau Sumatra sebesar 63,18 persen, Pulau Kalimantan sebesar 62,78 persen, Pulau Lainnya (Pulau Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua) sebesar 62,49 persen, dan Pulau Sulawesi sebesar 59,43 persen.

Tabel 4.10. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja dan Jenis Kelamin, Februari 2011

Jumlah Jam Kerja (Jam)		Laki-Laki	Perempuan	Total
0*	(%)	2,15	1,79	2,01
1 - 14	(%)	3,50	8,71	5,54
15 - 24	(%)	8,24	16,16	11,35
25 - 34	(%)	12,40	16,06	13,84
35 - 39	(%)	9,76	11,42	10,41
40 - 48	(%)	30,94	22,32	27,55
49 - 59	(%)	18,69	10,66	15,54
>=40	(%)	63,95	45,86	56,85
>=50	(%)	30,33	21,29	26,78
>=60	(%)	14,32	12,88	13,76

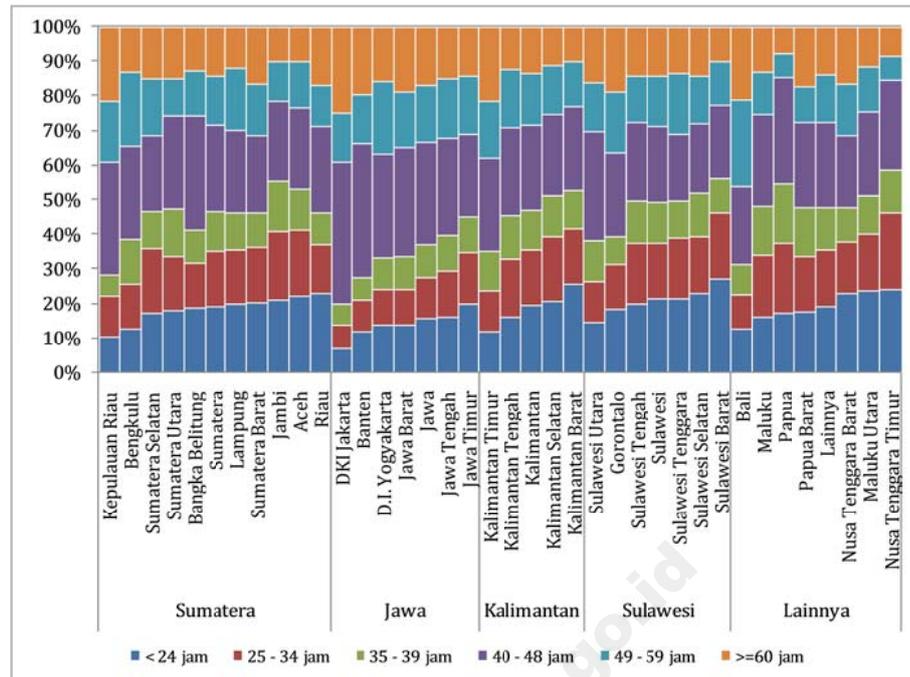
* Sementara tidak bekerja

Tabel 4.11. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja dan Klasifikasi Daerah, Februari 2011

Jumlah Jam Kerja (Jam)		Kota	Desa	Total
0*	(%)	2,12	1,91	2,01
1 - 14	(%)	4,00	6,93	5,54
15 - 24	(%)	7,38	14,92	11,35
25 - 34	(%)	10,15	17,15	13,84
35 - 39	(%)	9,13	11,56	10,41
40 - 48	(%)	32,50	23,11	27,55
49 - 59	(%)	16,48	14,70	15,54
>=40	(%)	67,22	47,53	56,85
>=50	(%)	32,26	21,85	26,78
>=60	(%)	18,24	9,72	13,76

* Sementara tidak bekerja

Grafik 4.8. Jam Kerja Menurut Provinsi, Februari 2011



4.6. KILM 7. Pekerja Sektor Informal

Sektor informal merupakan bagian penting dari kehidupan ekonomi, sosial dan politik di sebagian besar negara berkembang, serta beberapa negara maju. Di negara-negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk atau urbanisasi yang tinggi, ekonomi informal cenderung tumbuh untuk menyerap sebagian besar tenaga kerja. Konferensi Internasional Statistik Perburuhan (ICLS) ke-15 mendefinisikan sektor informal sebagai unit produksi dalam usaha rumahtangga yang dimiliki oleh rumah tangga. Mereka yang bekerja di sektor informal terdiri semua orang yang, selama periode acuan tertentu, yang bekerja di setidaknya satu unit produksi yang memenuhi konsep sektor informal, terlepas dari status mereka dalam pekerjaan dan apakah itu mereka utama atau pekerjaan sekunder. Resolusi ICLS memperbolehkan beberapa variasi konsep nasional.

Akibatnya, informasi untuk indikator sering didasarkan pada definisi nasional dan pengukuran ekonomi informal.

Jumlah laki-laki yang bekerja di sektor informal lebih banyak dibanding perempuan yaitu 37,8 juta orang laki-laki dan 27,1 juta orang perempuan. Namun jika dilihat berdasarkan persentasenya, persentase perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Baik pekerja informal laki-laki maupun pekerja informal perempuan, keduanya persentasenya lebih dari 50, bahkan pekerja informal perempuan persentasenya mencapai 62,10. Persentase sebesar 62,10 persen mempunyai arti bahwa dari 100 pekerja perempuan, sekitar 62 perempuan bekerja di sektor informal. Sedangkan jika dibandingkan terhadap total pekerja, *share* perempuan dalam sektor informal adalah 24,36 persen. Persentase ini mempunyai arti bahwa dari 100 penduduk yang bekerja di sektor informal, sekitar 24 diantaranya adalah perempuan.

Jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, pekerja sektor informal didominasi oleh mereka yang tinggal di perdesaan, dimana jumlahnya mencapai 43,6 juta orang dibanding perkotaan yang jumlahnya 21,4 orang. Dari segi persentase, pekerja informal di perdesaan persentasenya juga lebih besar dibanding perkotaan, dimana masing-masing persentasenya adalah 74,39 dan 40,57. Angka ini berarti bahwa dari 100 pekerja di perdesaan, sekitar 74 orang bekerja di sektor informal dan dari 100 pekerja di perkotaan, sekitar 41 orang bekerja di sektor informal.

Ditinjau berdasarkan provinsi, provinsi Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur persentase pekerja informalnya mencapai angka di atas 70 persen. Sedangkan untuk provinsi dengan persentase pekerja informal yang paling kecil adalah Provinsi DKI Jakarta dan Kepulauan Riau, dimana persentasenya hanya 24,10 dan 30,19.

BAB 5

INDIKATOR PENGANGGURAN**5.1. KILM 8. Pengangguran**

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) atau biasanya disebut sebagai tingkat pengangguran menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari dan tersedia untuk bekerja. Konsep ini harus dilihat secara hati-hati dan tidak bisa digunakan sebagai pengukuran kesulitan ekonomi, meskipun korelasi antara TPT dengan kesulitan ekonomi (baca:kemiskinan) seringkali ada.

Bersama dengan rasio pekerja terhadap jumlah penduduk (KILM 2), tingkat pengangguran menyediakan indikator situasi pasar tenaga kerja di negara-negara yang mengumpulkan informasi tentang tenaga kerja.

Tingkat pengangguran oleh banyak negara digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan (*excess supply*). Jika bekerja diambil sebagai situasi yang diinginkan bagi orang-orang dalam populasi yang secara ekonomi aktif (angkatan kerja), maka pengangguran menjadi situasi yang tidak diinginkan. Namun, beberapa pengangguran jangka pendek dapat diinginkan dan diperlukan untuk memastikan penyesuaian terhadap fluktuasi ekonomi. Tingkat pengangguran pada kelompok tertentu, ditentukan oleh usia, jenis kelamin, pekerjaan atau lapangan usaha, juga berguna dalam mengidentifikasi kelompok pekerja dan sektor-sektor yang paling rentan terhadap pengangguran.

Tingkat pengangguran dapat dianggap sebagai indikator yang paling informatif yang mencerminkan indikasi pasar umum dan kinerja pasar tenaga kerja dan ekonomi secara keseluruhan, tetapi, tidak harus ditafsirkan sebagai ukuran kesulitan ekonomi atau kesejahteraan. Bila didasarkan pada standar internasional yang direkomendasikan, tingkat pengangguran hanya memberikan gambaran proporsi angkatan kerja

yang tidak memiliki pekerjaan tapi tersedia dan secara aktif mencari pekerjaan.

Angka ini menggambarkan tentang sumber daya ekonomi pekerja menganggur atau anggota keluarga mereka. Penggunaannya harus dibatasi sebagai ukuran pemanfaatan tenaga kerja serta indikasi kegagalan untuk mencari pekerjaan.

Tingkat pengangguran secara matematis didefinisikan sebagai hasil bagi yang dihasilkan dari membagi jumlah pengangguran (untuk negara atau kelompok tertentu pekerja) oleh tenaga kerja yang sesuai, yang merupakan jumlah total orang yang bekerja dan tidak bekerja dalam kelompok. Harus ditekankan bahwa pengertian tersebut merupakan tenaga kerja atau bagian aktif secara ekonomi penduduk yang berfungsi sebagai dasar untuk statistik ini, bukan jumlah penduduk. Perbedaan ini tidak selalu dipahami oleh publik. Memang, istilah "angkatan kerja" dan "bekerja" kadang-kadang keliru digunakan secara bergantian.

Secara konsisten dan perlahan, TPT di Indonesia mengalami penurunan dari yang semula 7,41 pada Februari 2010 menjadi 7,14 pada Agustus 2010 hingga turun menjadi 6,80 di Februari 2011. Berdasarkan jenis kelamin, pada Februari 2011 TPT perempuan sebesar 7,38 persen lebih tinggi dibandingkan TPT laki-laki sebesar 6,42 persen meskipun secara absolut jumlah penganggur laki-laki lebih banyak dibanding penganggur perempuan. TPT perempuan adalah 7,38 persen, artinya, dari 100 orang perempuan yang termasuk dalam angkatan kerja, 7 diantaranya menganggur. Jika dilihat dalam setahun terakhir (Februari 2010–Februari 2011), penurunan TPT perempuan lebih cepat dibandingkan laki-laki, masing-masing penurunannya sebesar 0,85 persen dan 0,46 persen. Sedangkan jika dilihat berdasarkan Klasifikasi Daerah, TPT perkotaan sebesar 9,02 persen lebih tinggi dibandingkan TPT perdesaan yang hanya 4,70 persen.

Jika melihat TPT per pulau, hanya Pulau Jawa yang TPT nya lebih besar dibandingkan TPT nasional, yakni sebesar 7,48 persen. Kondisi ini mungkin disebabkan banyaknya penduduk pendatang di Pulau Jawa (berimplikasi jumlah angkatan kerja tinggi) namun cukup banyak yang tidak mendapatkan pekerjaan (banyak penganggur). Kondisi sebaliknya

terdapat di Pulau lainnya (Bali, NTT, NTB, dan lainnya) yang memberikan gambaran cukup fantastik, dimana TPT nya hanya 4,19 persen. Kecilnya TPT tersebut didukung dengan kecilnya TPT di Bali dan NTT yang masing-masing hanya sebesar 2,86 dan 2,67 persen.

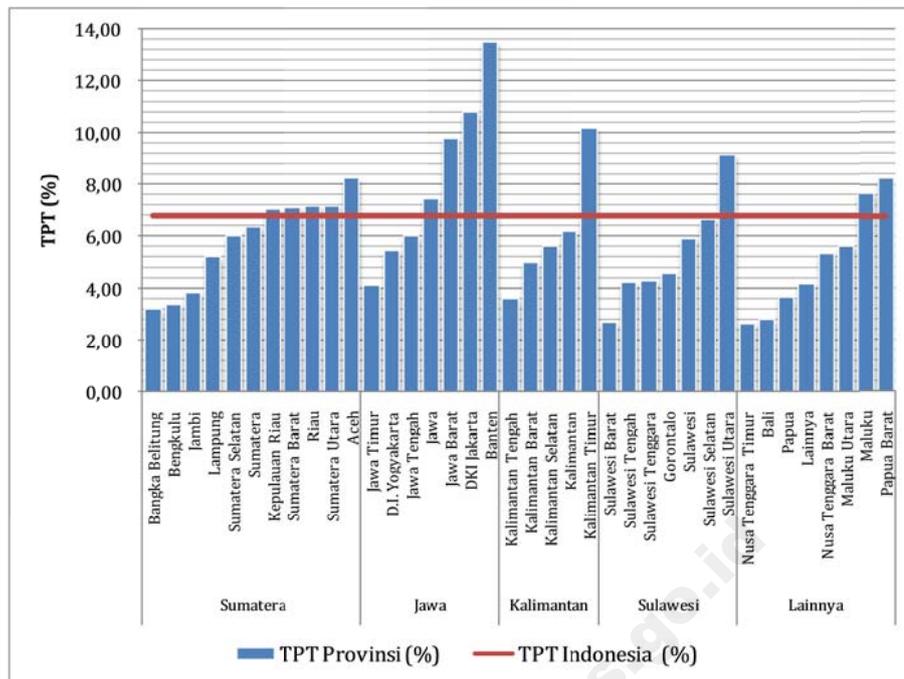
Tabel 5.1. Jumlah Angkatan Kerja, Penganggur dan TPT Menurut Jenis Kelamin, Februari 2011

Rincian		Laki-Laki	Perempuan	Total
Jumlah Angkatan Kerja	Juta	72,26	47,14	119,40
Jumlah Penganggur	Juta	4,64	3,48	8,12
Tingkat Pengangguran	(%)	6,42	7,38	6,80

Tabel 5.2. Jumlah Angkatan Kerja, Penganggur dan TPT Menurut Klasifikasi Daerah, Februari 2011

Rincian		Kota	Desa	Total
Jumlah Angkatan Kerja	Juta	57,94	61,46	119,40
Jumlah Penganggur	Juta	5,23	2,89	8,12
Tingkat Pengangguran	(%)	9,02	4,70	6,80

Grafik 5.1. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi, Februari 2011



5.2. KILM 9. Pengangguran Pada Kelompok Usia Muda

Penganggur pada kelompok usia muda merupakan masalah kebijakan yang penting bagi banyak negara, terlepas dari tahap pembangunan. Untuk tujuan indikator ini, istilah "usia muda" mencakup orang yang berusia 15 sampai 24, sedangkan "orang dewasa" didefinisikan sebagai orang yang berusia 25 tahun ke atas. Indikator pengangguran kaum muda disajikan dengan rincian sebagai berikut:

1. Tingkat pengangguran kaum muda.
2. Tingkat pengangguran kaum muda sebagai persentase dari tingkat pengangguran dewasa.
3. *Share* pengangguran kaum muda terhadap total; dan
4. Pengangguran kaum muda sebagai proporsi dari populasi kaum muda.

Pada Februari 2011, TPT usia muda adalah sebesar 23,92, atau lebih dari tiga kali lipat TPT semua umur (nasional). Dirinci berdasarkan jenis kelamin, tidak terlihat perbedaan yang signifikan antara TPT usia muda pada penduduk perempuan dan TPT usia muda penduduk laki-laki, dengan besaran masing-masing 23,01 dan 25,28 (masih cukup dekat dengan TPT usia muda sebesar 23,92). Bila dibandingkan dengan TPT dewasa, baik TPT usia muda laki-laki maupun TPT usia muda perempuan hampir sama, yakni berkisar 7 kali lipat dari TPT dewasa. Berdasarkan rasio tersebut dapat dikatakan bahwa penyumbang TPT nasional terbesar berada pada kelompok usia muda. Gambaran tersebut diperjelas dengan *share* usia muda penganggur terhadap total penganggur (baik laki-laki maupun perempuan) yang angkanya di atas 60 persen. Sedangkan dari total usia muda sendiri, penduduk usia muda lebih banyak yang bekerja dibanding menganggur, terlihat nilai *share* usia muda terhadap total usia muda 12,03 persen.

TPT usia muda berdasarkan jenis kelamin tidak menunjukkan perbedaan yang cukup mencolok, lain halnya berdasarkan tempat tinggal. Berdasarkan Klasifikasi Daerah, TPT usia muda di perkotaan jauh lebih besar dibanding perdesaan. Jika dibandingkan dengan TPT dewasa, TPT usia muda perkotaan 6,47 kali dibandingkan dengan TPT dewasa di perkotaan, sedangkan TPT usia muda di perdesaan mencapai 9,00 kali TPT dewasa perdesaan. Baik di perkotaan maupun perdesaan memperlihatkan bahwa *share* usia muda penganggur terhadap total penganggur masih mendominasi jumlah penganggur, yang masing-masing sumbangannya 58,89 persen dan 63,80 persen. Kondisi ini berarti bahwa dari 100 penganggur di perkotaan sekitar 59 penganggur termasuk dalam kelompok usia muda dan dari 100 penganggur di perdesaan sekitar 64 penganggur termasuk dalam kelompok muda. Sedangkan dari total usia muda sendiri, penganggur usia muda di perkotaan menyumbang nilai TPT lebih besar dibandingkan penganggur usia muda di perdesaan.

Tabel 5.3. Tingkat Pengangguran Terbuka Pada Kelompok Usia Muda Menurut Jenis Kelamin, Februari 2011

Rincian		Laki-Laki	Perempuan	Total
TPT Usia Muda	(%)	23,01	25,28	23,92
Rasio TPT Usia Muda terhadap TPT Dewasa	(%)	7,65	7,06	7,40
Share Usia Muda Penganggur terhadap Total Penganggur	(%)	61,09	60,03	60,64
Share Usia Muda Penganggur terhadap Total Usia Muda	(%)	13,76	10,27	12,03

Tabel 5.4. Tingkat Pengangguran Terbuka Pada Kelompok Usia Muda Menurut Klasifikasi Daerah, Februari 2011

Rincian		Kota	Desa	Total
TPT Usia Muda	(%)	29,30	18,31	23,92
Rasio TPT Usia Muda terhadap TPT Dewasa	(%)	6,47	9,00	7,40
Share Usia Muda Penganggur terhadap Total Penganggur	(%)	58,89	63,80	60,64
Share Usia Muda Penganggur terhadap Total Usia Muda	(%)	14,35	9,47	12,03

5.3. KILM 11. Pengangguran dan Pendidikan

Indikator ini melihat hubungan antara pencapaian pendidikan pekerja dan pengangguran yang memberikan gambaran mengenai perubahan dalam permintaan pekerja. Informasi yang diberikan dapat memiliki implikasi penting bagi pekerja dan kebijakan pendidikan. Jika dikonfirmasi bahwa orang dengan tingkat pendidikan yang rendah berada pada risiko

yang lebih tinggi menjadi pengangguran, reaksi politik yang mungkin adalah meningkatkan tingkat pendidikan mereka atau untuk menciptakan lebih banyak pekerjaan dengan keterampilan rendah (*low skilled job*) di dalam negeri. Cara lainnya, *share* pengangguran yang lebih tinggi di kalangan orang-orang dengan pendidikan tinggi bisa menunjukkan kurangnya pekerjaan teknis yang profesional dan tingkat tinggi. Tabel yang disajikan menunjukkan distribusi persentase dari total pengangguran sesuai dengan tingkat pendidikan yaitu tidak/belum pernah bersekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, dan sekolah tinggi¹.

Berdasarkan pendidikan terakhir, jumlah penganggur di Indonesia pada Februari 2011 didominasi oleh mereka yang pendidikan terakhirnya sekolah dasar dan sekolah menengah yang masing-masing persentasenya sebesar 44,74 dan 41,22. Kondisi yang menarik perhatian lebih lanjut adalah perempuan menganggur dengan pendidikan terakhir Sekolah Tinggi sebanyak 16,89 persen yang juga berarti bahwa dari 100 penganggur perempuan sekitar 17 perempuan berpendidikan terakhir Sekolah Tinggi. Kondisi ini sangat berbeda pada mereka yang tidak/belum pernah bersekolah, dimana persentasenya hanya 1,14. Kecilnya persentase jumlah penganggur ini mungkin disebabkan karena mereka yang berpendidikan rendah mudah menerima pekerjaan (tidak pilih-pilih), bersedia dibayar dengan upah yang rendah, atau bersedia berusaha kecil-kecilan dengan modal seadanya. Sedangkan jika dilihat berdasarkan tempat tinggalnya, mereka yang berpendidikan terakhir sekolah dasar, persentase penganggurnya lebih besar di daerah perdesaan dibanding perkotaan yang masing-masing nilainya 59,44 dan 36,61 namun mereka yang berpendidikan terakhir sekolah menengah persentase penganggur di perkotaan lebih besar dibanding perdesaan yang masing-masing nilainya 46,19 dan 32,24.

¹ Silahkan mengacu pada Bab 2 untuk penjelasan teknis pengelompokan tingkat pendidikan

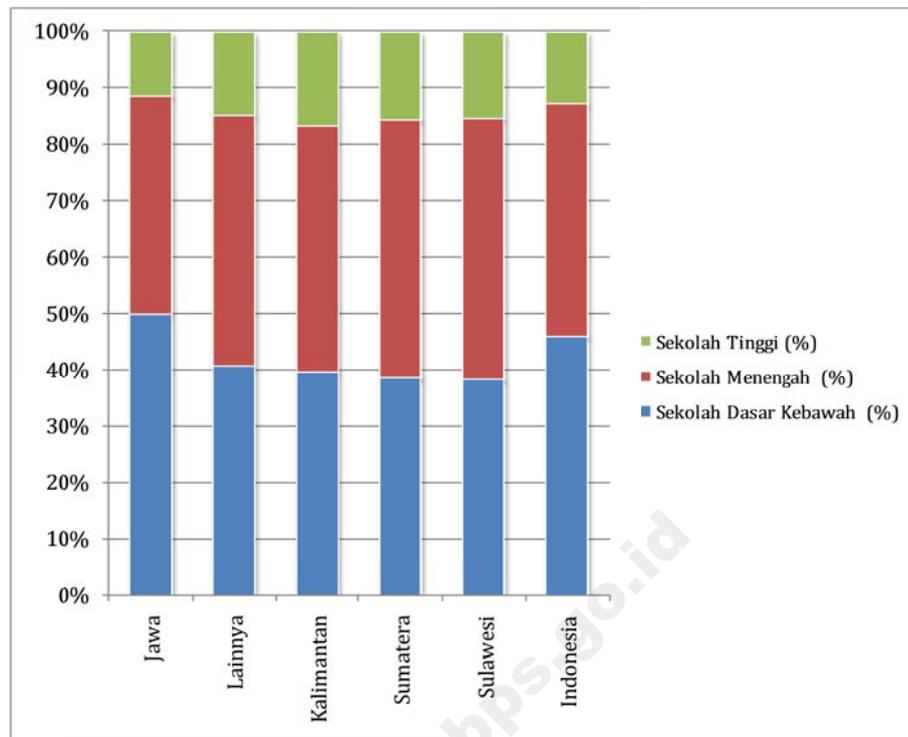
Tabel 5.5. Persentase Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan Terakhir dan Jenis Kelamin, Februari 2011

Tingkat Pendidikan Terakhir		Laki-Laki	Perempuan	Total
Tidak Pernah Sekolah	(%)	0,84	1,52	1,14
Sekolah Dasar	(%)	47,06	41,65	44,74
Sekolah Menengah	(%)	42,19	39,94	41,22
Sekolah Tinggi	(%)	9,90	16,89	12,90

Tabel 5.6. Persentase Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan Terakhir dan Klasifikasi Daerah, Februari 2011

Tingkat Pendidikan Terakhir		Kota	Desa	Total
Tidak Pernah Sekolah	(%)	0,56	2,17	1,14
Sekolah Dasar	(%)	36,61	59,44	44,74
Sekolah Menengah	(%)	46,19	32,24	41,22
Sekolah Tinggi	(%)	16,64	6,14	12,90

Grafik 5.2. Persentase Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan Terakhir dan Pulau, Februari 2011



Jika dilihat penyebarannya berdasarkan pulau, kondisi di Pulau Jawa berbeda dengan pulau-pulau lainnya. Di Pulau Jawa jumlah penganggur didominasi oleh mereka yang berpendidikan sekolah dasar ke bawah, sedangkan di pulau lain didominasi oleh mereka yang berpendidikan sekolah menengah.

5.4. KILM 12. Setengah Penganggur

Penduduk yang dikategorikan sebagai setengah penganggur adalah mereka yang jam kerjanya di bawah ambang batas jam kerja normal (<35 jam dalam seminggu) dan mereka masih mencari atau menerima pekerjaan tambahan untuk menambah jumlah jam kerjanya. Pada Februari 2011 jumlah setengah penganggur di Indonesia adalah

15,74 juta jiwa, dimana 8,81 juta jiwa berjenis kelamin laki-laki dan sisanya adalah perempuan. Tidak terlihat perbedaan yang cukup kentara pada tingkat setengah penganggur terhadap angkatan kerja jika ditilik dari sisi jenis kelamin, dimana masing-masing persentasenya sebesar 12,19 dan 14,69 (tidak jauh berbeda terhadap persentase umum yang nilainya 13,18 persen).

Kondisi yang sama juga terjadi jika dibandingkan terhadap jumlah penduduk yang bekerja. Dari total penduduk yang bekerja, 14,14 persennya bekerja dibawah jam kerja normal yang sebenarnya mereka masih ingin mendapatkan jam kerja tambahan. Sedangkan dari sisi tempat tinggal, sebagian besar setengah penganggur berdomisili di daerah perdesaan baik jika dibandingkan terhadap jumlah angkatan kerja maupun jumlah penduduk yang bekerja. Kondisi ini mungkin disebabkan kurangproduktifan penduduk bekerja di daerah perdesaan. Semakin menyempitnya lahan pertanian memungkinkan kerja serobotan, yang seharusnya lahan tersebut dikerjakan oleh satu orang menjadi 2 orang.

Dari seluruh total setengah penganggur, sebagian besar berpendidikan terakhir Sekolah Dasar dimana persentasenya mencapai 68,47. Sementara setengah penganggur dari tingkat pendidikan kurang dari satu tahun dan Sekolah Tinggi persentasenya cukup kecil yang masing-masing besarnya adalah 6,74 dan 6,47. Tingginya persentase setengah penganggur yang berpendidikan terakhir Sekolah Dasar tampak pada tabel menurut Klasifikasi Daerah maupun jenis kelamin dimana nilainya jauh berbeda dibanding jenjang pendidikan yang lain. Dari 5,92 juta setengah penganggur di perkotaan, 11,53 persennya adalah lulusan Sekolah Tinggi. Persentase ini cukup besar dibandingkan di daerah perdesaan yang hanya mencapai 3,42. Cukup tingginya perbedaan ini mungkin disebabkan jumlah lulusan Sekolah Tinggi di perkotaan lebih besar dibanding daerah perdesaan sehingga kesempatan kerja bagi lulusan Sekolah Tinggi di perdesaan lebih besar karena pesaingnya sedikit.

Dilihat berdasarkan kelompok pulau, dua kelompok pulau dengan *share* perempuan terhadap setengah penganggur terbesar terdapat di Pulau Lainnya (Bali, NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua) dan Pulau Jawa.

Tabel 5.7. Persentase Setengah Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan Terakhir dan Jenis Kelamin, Februari 2011

Tingkat Pendidikan Terakhir		Laki-Laki	Perempuan	Total
Tidak Pernah Sekolah	(%)	4,83	9,17	6,74
Sekolah Dasar	(%)	69,56	67,09	68,47
Sekolah Menengah	(%)	20,18	15,94	18,31
Sekolah Tinggi	(%)	5,43	7,80	6,47

Tabel 5.8. Persentase Setengah Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan Terakhir dan Klasifikasi Daerah, Februari 2011

Tingkat Pendidikan Terakhir		Kota	Desa	Total
Tidak Pernah Sekolah	(%)	3,85	8,48	6,74
Sekolah Dasar	(%)	58,35	74,59	68,47
Sekolah Menengah	(%)	26,28	13,51	18,31
Sekolah Tinggi	(%)	11,53	3,42	6,47

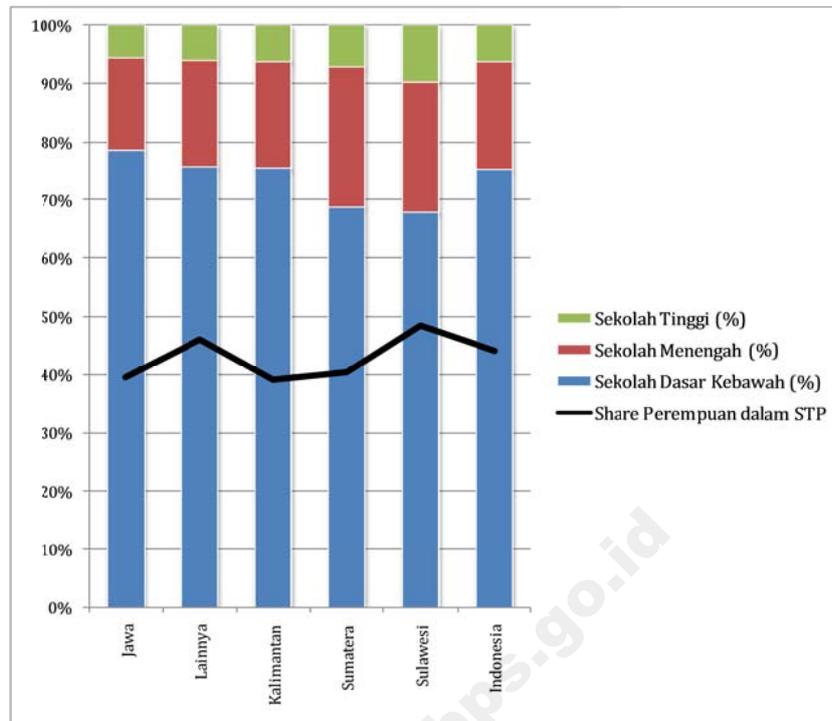
Tabel 5.9. Setengah Penganggur Menurut Jenis Kelamin,
Februari 2011

Rincian		Laki-Laki	Perempuan	Total
Penduduk yang bekerja di bawah jam normal	Juta	8,81	6,93	15,74
Tingkat penduduk yang bekerja di bawah jam normal terhadap angkatan kerja	(%)	12,19	14,69	13,18
Penduduk yang bekerja di bawah jam normal terhadap total penduduk yang bekerja	(%)	13,03	15,86	14,14

Tabel 5.10. Setengah Penganggur Menurut Klasifikasi Daerah,
Februari 2011

Rincian		Kota	Desa	Total
Penduduk yang bekerja di bawah jam normal	Juta	5,92	9,81	15,74
Tingkat penduduk yang bekerja di bawah jam normal terhadap angkatan kerja	(%)	10,22	15,97	13,18
Penduduk yang bekerja di bawah jam normal terhadap total penduduk yang bekerja	(%)	11,24	16,75	14,14

Grifik 5.3. Persentase Setengah Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan Terakhir Menurut Pulau, Februari 2011



5.5. KILM 13. Tingkat Ketidakaktifan

Tingkat ketidakaktifan adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja yang tidak terlibat aktif dalam pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan. Tingkat ketidakaktifan merupakan proporsi penduduk usia kerja yang tidak termasuk dalam angkatan kerja. Jika dijumlahkan, tingkat ketidakaktifan dan tingkat partisipasi angkatan kerja (lihat KILM 1), maka hasilnya adalah 100 persen.

Dalam beberapa situasi, tingkat ketidakaktifan yang tinggi untuk kelompok populasi tertentu tidak harus selalu dilihat sebagai sesuatu yang buruk, misalnya, tingkat ketidakaktifan yang relatif tinggi untuk wanita usia 25–34 tahun mungkin disebabkan karena mereka meninggalkan

pasar kerja untuk mengurus keluarga dan melaksanakan tanggung jawab seperti melahirkan anak dan pengasuhan anak. Dengan menggunakan data dalam KILM 13, pengguna data dapat melihat sejauh mana ibu berkaitan dengan pola tenaga kerja perempuan.

Telah lama diakui bahwa aspek-aspek struktur rumah tangga terkait dengan aktivitas pasar tenaga kerja. Misalnya, perempuan kepala rumah tangga cenderung memiliki tingkat ketidakaktifan yang relatif rendah. Di antara pasangan yang menikah, suami biasanya memiliki tingkat ketidakaktifan yang rendah, terutama jika ada anak-anak dalam keluarga. Namun, rendahnya tingkat ketidakaktifan wanita biasanya diikuti dengan tingginya tingkat ketidakaktifan untuk laki-laki, yaitu suami, jika laki-laki sedang menyelesaikan pendidikan atau secara fisik tidak mampu bekerja, sehingga membuat istri pencari nafkah utama.

Berdasarkan kelompok umur, pada Februari 2011 kelompok umur yang tingkat ketidakaktifannya kecil (yang berarti bahwa TPAK-nya paling besar) terdapat pada umur 35–54 tahun. Dari laki-laki pada kelompok umur tersebut tingkat ketidakaktifannya hanya 2,20. Kondisi ini diduga disebabkan pada usia tersebut laki-laki sedang mempersiapkan modal untuk berumah tangga atau tanggung jawab mereka sebagai pencari nafkah bagi yang sudah berumah tangga. Baik pada laki-laki maupun perempuan, tingkat ketidakaktifan terbesar terdapat kelompok umur 65 tahun ke atas yang masing-masing nilainya adalah 42,38 dan 71,20. Besarnya tingkat ketidakaktifan pada kelompok umur ini mungkin disebabkan mereka yang sudah pensiun yang menghabiskan hari-harinya untuk aktivitas keagamaan, kemasyarakatan ataupun kegiatan sosial yang bertujuan untuk kedamaian jiwanya. Perbedaan tingkat ketidakaktifan yang cukup mencolok antara laki-laki dan perempuan terdapat pada kelompok umur 25–34 tahun yang juga mungkin disebabkan kewajiban laki-laki sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Jika dilihat berdasarkan Klasifikasi Daerah, pada semua kelompok umur tingkat ketidakaktifan di perkotaan selalu lebih besar dibanding daerah perdesaan. Ini berarti bahwa proporsi penduduk perkotaan yang tidak terlibat dalam aktivitas ekonomi lebih banyak dibandingkan di perdesaan. Fenomena ini mungkin disebabkan aktivitas pertanian memungkinkan melibatkan anggota keluarga dan

kerabatnya, walaupun dari sisi output kurang produktif. Lain halnya jika ditilik berdasarkan pulau, semua pulau menampakkan bahwa tingkat ketidakaktifan paling kecil adalah pada kelompok umur 35–54 tahun.

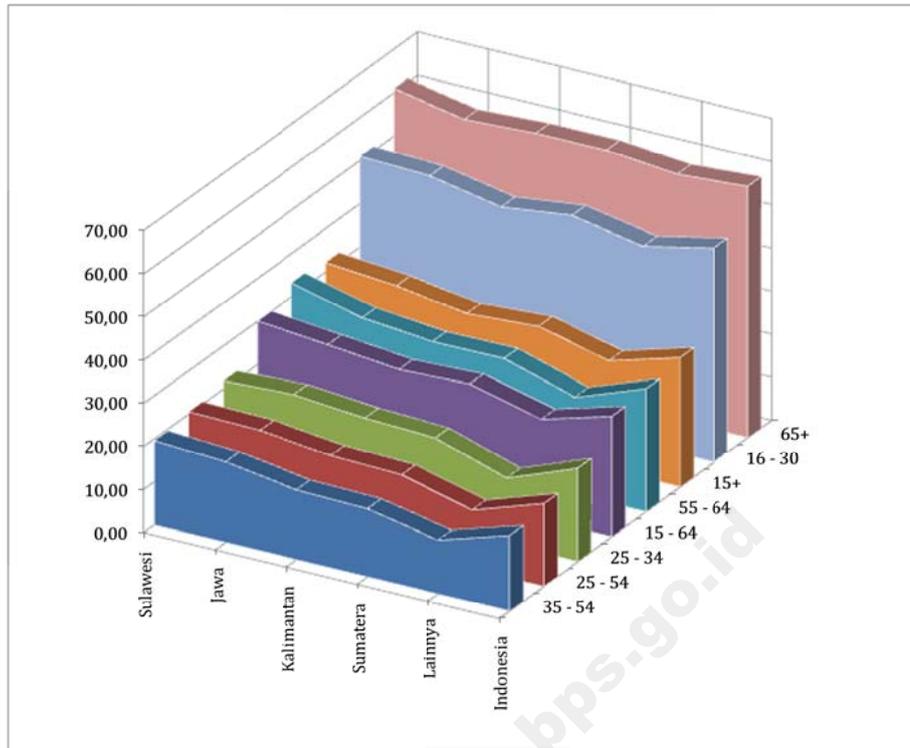
Tabel 5.11. Jumlah Penduduk, Jumlah BAK dan Tingkat Ketidakeaktifan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Februari 2011

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk (Juta)			Jumlah BAK (Juta)			Tingkat Ketidakeaktifan (%)		
	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
15+	85,16	85,50	170,66	12,90	38,36	51,26	15,14	44,87	30,04
15 - 24	20,58	20,34	40,92	8,27	12,08	20,35	40,19	59,36	49,72
15 - 64	79,83	79,00	158,83	10,64	33,73	44,37	13,33	42,70	27,94
25 - 54	51,73	51,24	102,96	1,30	18,45	19,76	2,52	36,02	19,19
25 - 34	20,81	20,82	41,63	0,62	8,37	8,99	2,98	40,19	21,59
35 - 54	30,92	30,41	61,33	0,68	10,09	10,77	2,20	33,16	17,56
55 - 64	7,52	7,42	14,94	1,07	3,20	4,27	14,18	43,14	28,56
65+	5,33	6,50	11,83	2,26	4,63	6,89	42,38	71,20	58,22

Tabel 5.12. Menurut Kelompok Umur dan Klasifikasi Daerah, Februari 2011

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk (Juta)			Jumlah BAK (Juta)			Tingkat Ketidakeaktifan (%)		
	Kota	Desa	Total	Kota	Desa	Total	Kota	Desa	Total
15+	85,70	84,95	170,66	27,76	23,49	51,26	32,40	27,65	30,04
15 - 24	21,45	19,48	40,92	10,94	9,41	20,35	51,02	48,29	49,72
15 - 64	80,79	78,04	158,83	24,53	19,84	44,37	30,36	25,42	27,94
25 - 54	52,52	50,44	102,96	11,11	8,64	19,76	21,16	17,13	19,19
25 - 34	21,97	19,67	41,63	4,86	4,13	8,99	22,12	21,00	21,59
35 - 54	30,55	30,78	61,33	6,25	4,51	10,77	20,47	14,66	17,56
55 - 64	6,82	8,12	14,94	2,47	1,79	4,27	36,26	22,09	28,56
65+	4,91	6,92	11,83	3,23	3,65	6,89	65,84	52,81	58,22

Grafik 5.4. Tingkat Ketidaktifan Menurut Pulau dan Kelompok Umur, Februari 2011



BAB 6

INDIKATOR PENDIDIKAN DAN MELEK HURUF**KILM 14. Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf**

Informasi tentang tingkat pencapaian pendidikan saat ini adalah indikator terbaik yang tersedia untuk melihat tingkat keahlian tenaga kerja. Tingkat keahlian tenaga kerja merupakan faktor penentu kemampuan suatu negara untuk bersaing dengan sukses di pasar dunia dan membuat efisiensi penggunaan kemajuan teknologi yang cepat. KILM 14 menyajikan informasi mengenai tingkat pendidikan angkatan kerja sesuai dengan lima tingkat pendidikan yaitu kurang dari satu tahun, tingkat pra-dasar, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tersier. Kategori yang digunakan dalam indikator ini, secara konseptual berdasarkan tingkat Standar Internasional Klasifikasi Pendidikan (*ISCED*). Sayangnya, SAKERNAS tidak menyediakan data mengenai kemampuan baca tulis (melek huruf) pekerja, sehingga pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi tingkat literasi (melek huruf) hanyalah pendidikan saja.

Berdasarkan data Sakernas pada Februari 2011 angkatan kerja di Indonesia masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan terakhir Sekolah Dasar, dimana persentasenya mencapai 63,33 untuk kelompok dewasa, 59,21 untuk kelompok usia muda, dan 55,60 untuk kelompok pemuda. Berdasarkan jenis kelamin, perbedaan yang cukup mencolok pada tingkat sekolah tinggi terdapat pada kelompok pemuda, dimana masing-masing persentasenya 6,55 untuk pemuda laki-laki dan 13,86 untuk pemuda perempuan. Sedangkan jika dilihat berdasarkan Klasifikasi Daerah, angkatan kerja di perdesaan masih didominasi oleh lulusan Sekolah Dasar sedangkan di perkotaan lulusan Sekolah Menengah persentasenya tidak berbeda jauh dengan perdesaan. Masih berdasarkan Klasifikasi Daerah, perbedaan yang mencolok terdapat pada jenjang pendidikan terakhir Sekolah Dasar. Tingginya perbedaan ini terjadi pada kelompok pemuda, usia muda, maupun dewasa. Sebagai gambaran, persentase

pemuda perkotaan yang pendidikan terakhirnya Sekolah Dasar adalah 41,53 sedangkan pada pemuda perdesaan sebesar 71,07 yang berarti bahwa dari 100 angkatan kerja di perkotaan sekitar 42 orang berpendidikan terakhir Sekolah Dasar dan dari 100 angkatan kerja di perdesaan sekitar 71 orang berpendidikan terakhir Sekolah Dasar. Lebih rendahya persentase angkatan kerja di perkotaan yang berpendidikan terakhir Sekolah Dasar mungkin disebabkan cukup tingginya persentase pemuda perkotaan yang pendidikan terakhirnya Sekolah Menengah. Pada semua kelompok pulau di Indonesia, sebaran angkatan kerja berdasarkan pendidikan terakhir hampir sama, dimana angkatan kerjanya didominasi oleh lulusan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah.

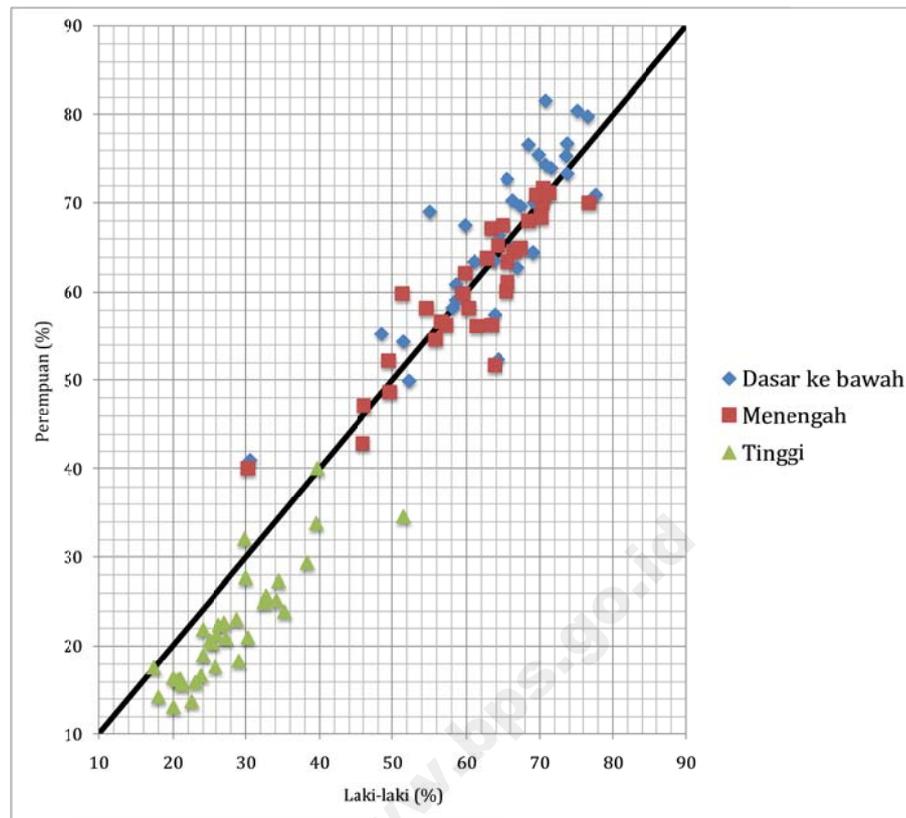
Tabel 6.1. Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Terakhir, Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Februari 2011

Tingkat Pendidikan Terakhir		Laki-Laki			Perempuan			Total		
		Pemuda	Usia Muda	Dewasa	Pemuda	Usia Muda	Dewasa	Pemuda	Usia Muda	Dewasa
Tidak Pernah Sekolah	(%)	1,04	0,99	3,65	1,48	1,40	7,38	1,21	1,15	5,12
Sekolah Dasar	(%)	57,68	62,22	62,34	52,36	54,73	64,86	55,60	59,21	63,33
Sekolah Menengah	(%)	34,73	33,36	26,01	32,29	34,95	17,60	33,77	33,99	22,70
Sekolah Tinggi	(%)	6,55	3,44	8,00	13,86	8,92	10,16	9,42	5,64	8,85

Tabel 6.2. Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Terakhir, Kelompok Umur dan Klasifikasi Daerah, Februari 2011

Tingkat Pendidikan Terakhir		Kota			Desa			Total		
		Pemuda	Usia Muda	Dewasa	Pemuda	Usia Muda	Dewasa	Pemuda	Usia Muda	Dewasa
Tidak Pernah Sekolah	(%)	0,27	0,27	2,14	2,25	2,07	7,86	1,21	1,15	5,12
Sekolah Dasar	(%)	41,53	45,89	50,59	71,07	73,11	75,10	55,60	59,21	63,33
Sekolah Menengah	(%)	44,46	45,37	33,01	22,02	22,13	13,19	33,77	33,99	22,70
Sekolah Tinggi	(%)	13,74	8,48	14,27	4,66	2,69	3,85	9,42	5,64	8,85

Grafik 6.1. Perbandingan Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin, Februari 2011



Grafik di atas merupakan perbandingan tingkat pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Garis diagonal (garis jender) menunjukkan persentase yang sama antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa untuk pendidikan tinggi, laki-laki masih dominan, sedangkan untuk pendidikan dasar kebawah, perempuan yang mendominasi. Terasa sangat jelas perbedaan pendidikan berdasarkan jender. Hal ini juga diperkuat dengan relatif banyaknya laki-laki di pendidikan menengah, jika dibandingkan dengan perempuan.

Tabel 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, Februari 2011

Provinsi	Kelompok Umur			
	15 - 24	15 - 64	25 - 54	25 - 34
Sumatera	50,72	72,53	82,13	79,30
Aceh	43,26	68,63	81,51	79,24
Sumatera Utara	56,85	75,27	83,86	81,49
Sumatera Barat	45,65	71,70	83,10	79,56
Riau	48,20	69,48	79,28	77,11
Jambi	47,36	71,44	81,00	78,12
Sumatera Selatan	51,04	73,50	83,58	80,68
Bengkulu	47,64	75,90	87,70	83,82
Lampung	50,32	72,70	81,14	77,13
Bangka Belitung	52,02	70,89	78,63	75,88
Kepulauan Riau	55,61	69,69	76,20	76,40
Jawa	49,49	71,43	79,72	77,23
DKI Jakarta	52,27	69,46	77,80	80,75
Jawa Barat	48,24	67,16	75,25	72,28
Jawa Tengah	49,58	74,70	83,32	80,32
D.I. Yogyakarta	43,94	75,08	86,31	81,22
Jawa Timur	49,78	74,24	82,18	79,23
Banten	52,21	69,53	77,73	77,45
Kalimantan	52,75	73,16	81,62	78,66
Kalimantan Barat	55,20	76,61	85,88	83,15
Kalimantan Tengah	51,04	74,61	84,17	81,19
Kalimantan Selatan	51,70	72,49	81,06	78,15
Kalimantan Timur	51,86	68,93	75,98	72,85
Sulawesi	48,91	69,90	79,40	78,00
Sulawesi Utara	41,95	67,10	76,22	72,01
Sulawesi Tengah	50,83	74,65	84,11	80,64
Sulawesi Selatan	47,16	67,50	77,48	77,49
Sulawesi Tenggara	54,27	73,97	83,33	80,58
Gorontalo	41,04	65,36	75,45	73,81
Sulawesi Barat	65,42	78,48	85,07	85,38
Lainnya	53,85	76,73	86,33	84,66
Bali	58,33	81,56	89,54	89,75
Nusa Tenggara Barat	47,18	71,54	81,99	79,31
Nusa Tenggara Timur	54,32	77,84	88,01	85,76
Maluku	43,81	71,14	83,68	81,65
Maluku Utara	48,68	71,61	81,67	79,86
Papua Barat	50,09	72,16	82,35	80,27
Papua	66,06	82,17	89,57	88,57
Indonesia	50,28	72,06	80,81	78,41

Tabel 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, Februari 2011 (Lanjutan)

Provinsi	Kelompok Umur			
	35 - 54	55 - 64	65+	Total
Sumatera	84,25	72,38	41,29	70,70
Aceh	83,28	64,82	33,21	66,64
Sumatera Utara	85,49	74,45	44,28	73,53
Sumatera Barat	85,41	71,23	33,76	68,42
Riau	81,12	63,52	40,58	68,36
Jambi	83,25	74,51	43,15	69,91
Sumatera Selatan	85,78	73,26	40,11	71,51
Bengkulu	90,62	81,17	49,44	74,25
Lampung	83,96	77,27	49,56	71,13
Bangka Belitung	80,88	72,22	32,44	68,92
Kepulauan Riau	75,99	55,26	17,79	68,14
Jawa	81,33	70,92	42,12	69,19
DKI Jakarta	75,33	55,35	28,71	67,94
Jawa Barat	77,33	64,09	37,87	65,38
Jawa Tengah	85,04	76,49	45,07	71,94
D.I. Yogyakarta	89,19	79,94	51,90	72,11
Jawa Timur	83,85	75,34	44,17	71,39
Banten	77,96	63,69	28,29	68,03
Kalimantan	83,89	72,48	41,37	71,67
Kalimantan Barat	87,93	77,17	44,73	74,97
Kalimantan Tengah	86,62	78,45	48,66	73,51
Kalimantan Selatan	83,13	70,78	39,51	70,68
Kalimantan Timur	78,49	63,63	33,26	67,66
Sulawesi	80,36	66,74	38,95	67,75
Sulawesi Utara	78,65	66,78	32,85	64,71
Sulawesi Tengah	86,65	77,09	49,98	73,31
Sulawesi Selatan	77,48	61,32	35,97	65,01
Sulawesi Tenggara	85,44	75,41	47,85	72,42
Gorontalo	76,59	66,96	38,42	63,90
Sulawesi Barat	84,83	73,53	42,79	76,08
Lainnya	87,52	77,42	42,91	74,68
Bali	89,40	77,91	46,39	78,49
Nusa Tenggara Barat	83,94	74,29	36,93	69,69
Nusa Tenggara Timur	89,50	81,57	43,53	75,10
Maluku	85,20	74,42	44,15	69,43
Maluku Utara	83,17	75,82	38,79	70,24
Papua Barat	84,22	71,31	49,61	71,50
Papua	90,40	79,89	39,43	81,51
Indonesia	82,44	71,44	41,78	69,96

Tabel 2. Jumlah Penduduk Usia Kerja (15+) Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, Februari 2011

Provinsi	Kelompok Umur			
	15 - 24	15 - 64	25 - 54	25 - 34
Sumatera	9 276,24	33 058,91	21 115,66	9 031,98
Aceh	887,92	2 930,08	1 816,15	795,93
Sumatera Utara	2 367,79	8 232,27	5 148,87	2 104,36
Sumatera Barat	832,14	3 038,54	1 913,75	753,66
Riau	1 037,11	3 647,58	2 388,14	1 092,03
Jambi	558,12	2 066,88	1 355,44	594,41
Sumatera Selatan	1 407,27	4 945,18	3 143,22	1 358,23
Bengkulu	319,83	1 128,52	731,75	313,58
Lampung	1 323,74	5 042,41	3 263,45	1 350,23
Bangka Belitung	226,47	836,29	539,58	242,91
Kepulauan Riau	315,86	1 191,16	815,31	426,65
Jawa	22 771,99	93 072,85	60 834,20	23 820,86
DKI Jakarta	1 840,80	7 098,34	4 714,62	2 154,12
Jawa Barat	7 591,85	28 953,64	18 755,66	7 744,49
Jawa Tengah	5 003,98	21 658,62	14 046,85	5 108,89
D.I. Yogyakarta	587,96	2 365,36	1 519,75	549,33
Jawa Timur	5 671,54	25 681,39	17 055,77	6 168,99
Banten	2 075,86	7 315,50	4 741,57	2 095,03
Kalimantan	2 491,55	9 237,26	6 068,20	2 629,86
Kalimantan Barat	793,74	2 855,07	1 819,88	781,98
Kalimantan Tengah	410,51	1 479,89	972,36	438,19
Kalimantan Selatan	655,42	2 461,03	1 625,48	674,36
Kalimantan Timur	631,88	2 441,27	1 650,49	735,34
Sulawesi	3 040,80	11 133,76	7 057,95	2 865,85
Sulawesi Utara	360,09	1 536,03	998,38	364,76
Sulawesi Tengah	449,95	1 684,87	1 098,04	464,23
Sulawesi Selatan	1 426,62	5 147,97	3 219,87	1 294,92
Sulawesi Tenggara	416,78	1 382,51	862,03	374,89
Gorontalo	184,41	678,84	434,91	177,24
Sulawesi Barat	202,95	703,54	444,73	189,83
Lainnya	3 342,54	12 325,07	7 887,01	3 282,38
Bali	575,66	2 669,34	1 807,31	684,24
Nusa Tenggara Barat	820,05	2 952,80	1 832,25	770,87
Nusa Tenggara Timur	776,30	2 738,40	1 696,24	677,00
Maluku	274,82	934,45	577,48	247,68
Maluku Utara	189,57	651,55	410,06	185,66
Papua Barat	147,93	498,57	322,93	152,83
Papua	558,22	1 879,95	1 240,73	564,11
Indonesia	40 923,12	158 827,85	102 963,02	41 630,94

Tabel 2. Jumlah Penduduk Usia Kerja (15+) Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, Februari 2011(Lanjutan)

Provinsi	Kelompok Umur			
	35 - 54	55 - 64	65+	Total
Sumatera	12 083,68	2 667,01	2 055,05	35 113,96
Aceh	1 020,22	226,00	174,69	3 104,77
Sumatera Utara	3 044,52	715,62	490,80	8 723,07
Sumatera Barat	1 160,08	292,66	288,19	3 326,73
Riau	1 296,11	222,33	147,00	3 794,57
Jambi	761,03	153,31	118,05	2 184,93
Sumatera Selatan	1 784,99	394,70	313,34	5 258,52
Bengkulu	418,17	76,93	75,11	1 203,64
Lampung	1 913,22	455,23	366,10	5 408,51
Bangka Belitung	296,68	70,25	45,10	881,40
Kepulauan Riau	388,66	59,99	36,67	1 227,83
Jawa	37 013,34	9 466,66	7 691,12	100 763,97
DKI Jakarta	2 560,50	542,92	275,07	7 373,41
Jawa Barat	11 011,16	2 606,14	1 875,31	30 828,95
Jawa Tengah	8 937,95	2 607,79	2 230,30	23 888,92
D.I. Yogyakarta	970,41	257,65	347,86	2 713,22
Jawa Timur	10 886,78	2 954,08	2 686,80	28 368,19
Banten	2 646,54	498,08	275,78	7 591,28
Kalimantan	3 438,34	677,52	454,26	9 691,53
Kalimantan Barat	1 037,90	241,46	155,44	3 010,51
Kalimantan Tengah	534,17	97,02	65,36	1 545,25
Kalimantan Selatan	951,12	180,14	143,06	2 604,09
Kalimantan Timur	915,15	158,90	90,40	2 531,67
Sulawesi	4 192,09	1 035,01	831,45	11 965,21
Sulawesi Utara	633,62	177,55	114,95	1 650,97
Sulawesi Tengah	633,81	136,89	97,03	1 781,90
Sulawesi Selatan	1 924,96	501,48	442,83	5 590,80
Sulawesi Tenggara	487,14	103,70	87,12	1 469,63
Gorontalo	257,67	59,52	38,76	717,60
Sulawesi Barat	254,90	55,87	50,78	754,32
Lainnya	4 604,63	1 095,51	796,40	13 121,47
Bali	1 123,07	286,37	255,42	2 924,76
Nusa Tenggara Barat	1 061,39	300,50	167,13	3 119,94
Nusa Tenggara Timur	1 019,25	265,87	237,67	2 976,07
Maluku	329,80	82,15	63,24	997,69
Maluku Utara	224,40	51,92	28,31	679,86
Papua Barat	170,10	27,71	15,18	513,75
Papua	676,62	81,00	29,45	1 909,40
Indonesia	61 332,08	14 941,71	11 828,29	170 656,14

Tabel 3. Jumlah Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, Februari 2011

Provinsi	Kelompok Umur			
	15 - 24	15 - 64	25 - 54	25 - 34
Sumatera	4 704,51	23 977,03	17 342,09	7 162,10
Aceh	384,09	2 010,94	1 480,36	630,68
Sumatera Utara	1 346,09	6 196,65	4 317,75	1 714,94
Sumatera Barat	379,85	2 178,71	1 590,41	599,63
Riau	499,85	2 534,46	1 893,40	842,02
Jambi	264,35	1 476,51	1 097,93	464,37
Sumatera Selatan	718,34	3 634,53	2 627,05	1 095,88
Bengkulu	152,38	856,59	641,77	262,83
Lampung	666,10	3 665,74	2 647,87	1 041,48
Bangka Belitung	117,82	592,81	424,26	184,31
Kepulauan Riau	175,64	830,09	621,29	325,97
Jawa	11 270,27	66 483,57	48 499,19	18 397,45
DKI Jakarta	962,16	4 930,86	3 668,19	1 739,44
Jawa Barat	3 662,04	19 445,22	14 113,00	5 598,02
Jawa Tengah	2 480,86	16 179,85	11 704,23	4 103,66
D.I. Yogyakarta	258,37	1 776,00	1 311,65	446,17
Jawa Timur	2 823,12	19 064,98	14 016,39	4 887,65
Banten	1 083,74	5 086,67	3 685,73	1 622,51
Kalimantan	1 314,24	6 758,29	4 953,00	2 068,70
Kalimantan Barat	438,12	2 187,34	1 562,89	650,25
Kalimantan Tengah	209,54	1 104,11	818,46	355,77
Kalimantan Selatan	338,87	1 784,01	1 317,64	526,98
Kalimantan Timur	327,71	1 682,83	1 254,01	535,70
Sulawesi	1 487,16	7 782,07	5 604,19	2 235,42
Sulawesi Utara	151,07	1 030,66	761,01	262,67
Sulawesi Tengah	228,71	1 257,81	923,57	374,36
Sulawesi Selatan	672,75	3 475,07	2 494,83	1 003,40
Sulawesi Tenggara	226,17	1 022,68	718,31	302,10
Gorontalo	75,68	443,69	328,15	130,82
Sulawesi Barat	132,78	552,16	378,31	162,07
Lainnya	1 799,91	9 456,77	6 808,67	2 778,89
Bali	335,78	2 177,10	1 618,20	614,14
Nusa Tenggara Barat	386,90	2 112,44	1 502,28	611,35
Nusa Tenggara Timur	421,72	2 131,44	1 492,86	580,62
Maluku	120,39	664,75	483,23	202,23
Maluku Utara	92,28	466,54	334,90	148,26
Papua Barat	74,09	359,78	265,93	122,67
Papua	368,74	1 544,72	1 111,28	499,62
Indonesia	20 576,08	114 457,73	83 207,13	32 642,57

Tabel 3. Jumlah Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, Februari 2011 (Lanjutan)

Provinsi	Kelompok Umur			
	35 - 54	55 - 64	65+	Total
Sumatera	10 179,99	1 930,43	848,62	24 825,65
Aceh	849,68	146,49	58,01	2 068,95
Sumatera Utara	2 602,81	532,81	217,31	6 413,95
Sumatera Barat	990,79	208,45	97,29	2 276,00
Riau	1 051,38	141,21	59,65	2 594,11
Jambi	633,56	114,23	50,94	1 527,46
Sumatera Selatan	1 531,17	289,14	125,70	3 760,23
Bengkulu	378,94	62,45	37,13	893,73
Lampung	1 606,39	351,77	181,44	3 847,18
Bangka Belitung	239,95	50,73	14,63	607,44
Kepulauan Riau	295,32	33,15	6,52	836,61
Jawa	30 101,74	6 714,11	3 239,58	69 723,15
DKI Jakarta	1 928,76	300,51	78,98	5 009,83
Jawa Barat	8 514,98	1 670,19	710,27	20 155,49
Jawa Tengah	7 600,56	1 994,76	1 005,09	17 184,93
D.I. Yogyakarta	865,48	205,98	180,54	1 956,54
Jawa Timur	9 128,75	2 225,47	1 186,69	20 251,67
Banten	2 063,22	317,21	78,01	5 164,68
Kalimantan	2 884,30	491,05	187,92	6 946,20
Kalimantan Barat	912,64	186,33	69,53	2 256,87
Kalimantan Tengah	462,69	76,11	31,81	1 135,92
Kalimantan Selatan	790,67	127,50	56,52	1 840,53
Kalimantan Timur	718,30	101,11	30,07	1 712,90
Sulawesi	3 368,77	690,72	323,83	8 105,90
Sulawesi Utara	498,34	118,58	37,76	1 068,42
Sulawesi Tengah	549,21	105,52	48,49	1 306,30
Sulawesi Selatan	1 491,43	307,49	159,29	3 634,36
Sulawesi Tenggara	416,21	78,20	41,68	1 064,37
Gorontalo	197,33	39,86	14,89	458,58
Sulawesi Barat	216,24	41,08	21,73	573,89
Lainnya	4 029,77	848,19	341,70	9 798,47
Bali	1 004,06	223,11	118,48	2 295,57
Nusa Tenggara Barat	890,93	223,25	61,73	2 174,16
Nusa Tenggara Timur	912,24	216,86	103,45	2 234,89
Maluku	281,00	61,14	27,92	692,67
Maluku Utara	186,64	39,36	10,98	477,52
Papua Barat	143,26	19,76	7,53	367,31
Papua	611,66	64,71	11,61	1 556,34
Indonesia	50 564,57	10 674,51	4 941,65	119 399,38

Tabel 4. Rasio Jumlah Penduduk Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk
Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Provinsi dan
Kelompok Umur, Februari 2011

Provinsi	Kelompok Umur		
	15+	15 - 24	25+
Sumatera	66,21	40,32	75,50
Aceh	61,13	31,94	72,82
Sumatera Utara	68,25	44,68	77,03
Sumatera Barat	63,53	33,59	73,52
Riau	63,46	37,26	73,32
Jambi	67,22	41,06	76,19
Sumatera Selatan	67,17	39,35	77,34
Bengkulu	71,72	42,39	82,34
Lampung	67,41	41,52	75,80
Bangka Belitung	66,68	47,00	73,49
Kepulauan Riau	63,34	50,24	67,88
Jawa	64,02	35,57	72,32
DKI Jakarta	60,58	33,92	69,46
Jawa Barat	58,95	33,78	67,17
Jawa Tengah	67,57	35,98	75,94
D.I. Yogyakarta	68,16	37,24	76,72
Jawa Timur	68,41	40,51	75,38
Banten	58,85	28,59	70,24
Kalimantan	67,21	41,29	76,18
Kalimantan Barat	71,23	45,88	80,31
Kalimantan Tengah	70,82	44,62	80,30
Kalimantan Selatan	66,70	41,13	75,31
Kalimantan Timur	60,75	33,53	69,81
Sulawesi	63,73	39,72	71,92
Sulawesi Utara	58,76	29,36	66,97
Sulawesi Tengah	70,18	43,79	79,09
Sulawesi Selatan	60,66	36,80	68,83
Sulawesi Tenggara	69,28	47,08	78,07
Gorontalo	60,96	32,01	70,97
Sulawesi Barat	74,03	61,49	78,64
Lainnya	71,55	47,20	79,87
Bali	76,24	50,71	82,50
Nusa Tenggara Barat	65,95	39,76	75,29
Nusa Tenggara Timur	73,09	50,51	81,06
Maluku	64,07	32,13	76,21
Maluku Utara	66,29	42,25	75,59
Papua Barat	65,57	40,43	75,74
Papua	78,48	60,77	85,79
Indonesia	65,21	38,25	73,71

Tabel 5. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, Februari 2011

Provinsi	Status Dalam Pekerjaan Utama (%)					
	1	2	3	4	5	6
Sumatera	29,20	3,88	38,50	6,75	21,66	66,92
Aceh	30,27	4,02	41,84	4,71	19,15	65,71
Sumatera Utara	29,30	3,61	36,54	5,79	24,77	67,09
Sumatera Barat	25,48	4,51	40,13	11,85	18,03	70,01
Riau	37,39	5,07	36,05	6,46	15,03	57,54
Jambi	27,62	4,81	39,57	6,67	21,33	67,57
Sumatera Selatan	26,13	3,06	41,88	5,44	23,48	70,80
Bengkulu	22,80	2,80	41,09	5,82	27,49	74,40
Lampung	21,03	3,38	40,18	9,47	25,93	75,59
Bangka Belitung	42,47	6,65	31,59	4,93	14,36	50,88
Kepulauan Riau	62,82	3,67	25,66	2,00	5,85	33,52
Jawa	32,73	3,07	37,18	12,30	14,72	64,20
DKI Jakarta	64,08	4,34	22,51	3,41	5,67	31,58
Jawa Barat	33,31	2,83	39,99	13,92	9,94	63,86
Jawa Tengah	25,96	2,90	40,00	14,35	16,79	71,14
D.I. Yogyakarta	39,34	4,27	32,78	8,59	15,02	56,39
Jawa Timur	26,27	3,10	38,00	12,07	20,56	70,63
Banten	48,79	2,83	28,46	9,73	10,19	48,38

Keterangan :

1. Penduduk yang Bekerja Dengan Upah/Gaji (Buruh/Karyawan/Pegawai)
2. Pengusaha (Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Tidak Dibayar dan Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar)
3. Berusaha Sendiri
4. Pekerja Bebas (Pekerja Bebas di Pertanian dan Non-Pertanian)
5. Pekerja Keluarga atau Pekerja Tak Dibayar
6. Rasio "Pekerja Rentan" Terhadap Total Penduduk yang Bekerja (Penjumlahan dari kode 3, 4 dan 5)

Tabel 5. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, Februari 2011 (Lanjutan)

Provinsi	Status Dalam Pekerjaan Utama (%)					
	1	2	3	4	5	6
Kalimantan	34,54	3,14	37,88	3,54	20,90	62,32
Kalimantan Barat	25,96	2,10	40,49	3,62	27,83	71,94
Kalimantan Tengah	34,67	2,64	37,96	2,23	22,50	62,69
Kalimantan Selatan	29,91	3,93	41,75	4,18	20,23	66,16
Kalimantan Timur	51,64	4,06	29,80	3,62	10,88	44,30
Sulawesi	27,61	3,83	42,04	5,69	20,83	68,56
Sulawesi Utara	34,62	4,85	39,38	9,85	11,30	60,53
Sulawesi Tengah	24,49	4,25	44,16	4,36	22,73	71,26
Sulawesi Selatan	27,45	4,05	42,27	4,96	21,27	68,50
Sulawesi Tenggara	26,28	3,02	42,31	3,50	24,89	70,70
Gorontalo	27,61	2,46	41,54	13,68	14,72	69,93
Sulawesi Barat	25,79	2,40	40,35	3,54	27,93	71,81
Lainnya	24,04	2,27	41,04	6,03	26,62	73,69
Bali	36,05	2,99	34,59	8,44	17,93	60,96
Nusa Tenggara Barat	20,37	2,39	44,72	11,94	20,58	77,24
Nusa Tenggara Timur	17,68	1,65	42,43	3,39	34,85	80,67
Maluku	23,23	2,18	46,84	2,20	25,55	74,59
Maluku Utara	28,02	3,13	39,78	4,85	24,21	68,85
Papua Barat	31,86	3,19	39,94	1,92	23,09	64,95
Papua	17,81	1,53	41,69	1,07	37,89	80,66
Indonesia	31,01	3,23	38,15	9,65	17,96	65,76

Keterangan :

1. Penduduk yang Bekerja Dengan Upah/Gaji (Buruh/Karyawan/Pegawai)
2. Pengusaha (Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Tidak Dibayar dan Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar)
3. Berusaha Sendiri
4. Pekerja Bebas (Pekerja Bebas di Pertanian dan Non-Pertanian)
5. Pekerja Keluarga atau Pekerja Tak Dibayar
6. Rasio "Pekerja Rentan" Terhadap Total Penduduk yang Bekerja (Penjumlahan dari kode 3, 4 dan 5)

Tabel 6. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Provinsi dan Lapangan Usaha (9 Sektor), Februari 2011

Provinsi	Lapangan Usaha								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sumatera	49,56	1,63	6,65	0,17	3,82	17,91	4,39	1,28	14,59
Aceh	47,60	0,72	6,55	0,20	4,70	14,90	3,61	0,96	20,76
Sumatera Utara	50,86	0,75	6,09	0,15	3,14	17,66	5,40	1,29	14,65
Sumatera Barat	44,14	2,43	7,60	0,21	4,89	18,45	4,32	1,31	16,66
Riau	43,65	1,16	6,14	0,21	4,03	21,21	4,41	2,42	16,77
Jambi	57,95	0,95	2,51	0,18	2,29	17,84	3,74	1,14	13,39
Sumatera Selatan	55,82	1,46	6,01	0,15	3,77	15,78	3,73	1,12	12,16
Bengkulu	62,27	1,10	3,53	0,33	3,17	14,24	2,75	0,78	11,84
Lampung	53,21	0,87	7,94	0,10	3,61	18,35	3,81	0,70	11,41
Bangka Belitung	30,03	21,12	5,52	0,33	4,50	22,00	2,15	1,41	12,95
Kepulauan Riau	16,51	1,42	19,20	0,25	7,48	24,25	9,12	2,64	19,12
Jawa	30,07	0,65	16,52	0,25	5,64	23,61	5,53	2,26	15,45
DKI Jakarta	1,97	0,31	14,08	0,52	3,95	33,92	11,45	7,86	25,93
Jawa Barat	22,02	0,84	19,23	0,26	6,44	26,76	7,02	2,25	15,19
Jawa Tengah	36,05	0,45	18,22	0,18	5,99	20,92	3,78	1,24	13,17
D.I. Yogyakarta	24,31	0,99	14,17	0,31	5,61	25,97	4,71	2,18	21,76
Jawa Timur	42,34	0,65	13,01	0,20	5,13	20,08	3,78	1,37	13,45
Banten	18,39	0,79	18,08	0,47	5,05	24,60	7,87	4,38	20,38
Kalimantan	48,30	4,36	5,37	0,31	4,43	16,95	3,38	1,38	15,52
Kalimantan Barat	63,00	1,84	3,17	0,26	4,11	13,74	2,15	0,83	10,90
Kalimantan Tengah	56,60	4,99	3,02	0,27	3,59	13,57	2,80	0,78	14,38
Kalimantan Selatan	41,66	2,93	9,72	0,19	4,44	19,60	4,18	0,84	16,45
Kalimantan Timur	29,41	9,03	5,19	0,55	5,47	20,86	4,60	3,20	21,70
Sulawesi	46,14	2,19	6,29	0,17	4,55	16,53	4,82	1,18	18,12
Sulawesi Utara	34,93	4,15	7,14	0,25	6,31	19,24	7,18	2,03	18,77
Sulawesi Tengah	50,26	3,41	4,13	0,16	4,49	13,17	4,82	0,89	18,67
Sulawesi Selatan	46,95	0,88	6,35	0,12	4,49	17,67	4,37	1,20	17,96
Sulawesi Tenggara	45,34	3,18	6,49	0,15	3,74	17,80	3,97	0,77	18,57
Gorontalo	41,13	4,00	9,28	0,27	3,67	14,63	5,83	1,27	19,91
Sulawesi Barat	56,83	0,83	6,64	0,37	4,14	11,57	4,18	0,95	14,50
Lainnya	52,10	1,11	7,06	0,20	4,56	15,79	4,34	1,27	13,57
Bali	28,84	0,57	13,06	0,20	8,19	27,81	4,23	2,88	14,23
Nusa Tenggara Barat	46,93	1,04	7,29	0,31	4,99	19,87	5,21	0,85	13,51
Nusa Tenggara Timur	67,30	1,26	5,12	0,13	2,82	6,77	3,90	0,53	12,17
Maluku	50,43	0,54	9,05	0,12	3,04	14,26	5,13	1,05	16,38
Maluku Utara	50,97	2,94	3,82	0,17	4,15	12,22	6,01	0,66	19,05
Papua Barat	51,59	3,36	3,03	0,34	3,90	12,37	5,73	1,12	18,56
Papua	72,93	0,99	1,64	0,16	1,99	7,89	2,82	0,87	10,71
Indonesia	38,17	1,22	12,31	0,23	5,02	20,89	5,02	1,85	15,30

Keterangan :

1. Pertanian, 2. Pertambangan, 3. Industri, 4. Listrik, Gas dan Air, 5. Bangunan, 6. Perdagangan, 7. Angkutan, 8. Keuangan dan 9. Jasa Kemasyarakatan

Tabel 7. Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi, Februari 2011

Provinsi	Rincian			
	Penduduk Bekerja (000)	Pekerja paruh waktu (000)	Tingkat Pekerja Paruh Waktu (%)	Share Perempuan Pada Pekerja Paruh Waktu (%)
Sumatera	23 248,17	4 734,95	20,37	56,36
Aceh	1 897,90	410,30	21,62	57,46
Sumatera Utara	5 953,34	1 251,14	21,02	61,54
Sumatera Barat	2 113,51	441,64	20,90	57,63
Riau	2 408,20	482,02	20,02	53,80
Jambi	1 468,66	357,01	24,31	47,22
Sumatera Selatan	3 532,14	836,27	23,68	52,28
Bengkulu	863,28	136,45	15,81	56,09
Lampung	3 645,70	658,85	18,07	56,33
Bangka Belitung	587,72	85,19	14,50	61,28
Kepulauan Riau	777,73	76,09	9,78	56,86
Jawa	64 505,65	8 658,55	13,42	61,70
DKI Jakarta	4 467,12	258,02	5,78	57,32
Jawa Barat	18 173,04	2 320,93	12,77	59,34
Jawa Tengah	16 142,44	2 198,32	13,62	63,91
D.I. Yogyakarta	1 849,43	148,30	8,02	61,54
Jawa Timur	19 406,03	3 312,06	17,07	62,15
Banten	4 467,60	420,92	9,42	62,30
Kalimantan	6 513,78	1 301,59	19,98	58,95
Kalimantan Barat	2 144,34	482,05	22,48	61,15
Kalimantan Tengah	1 094,32	213,33	19,49	58,20
Kalimantan Selatan	1 737,03	393,88	22,68	57,38
Kalimantan Timur	1 538,09	212,33	13,80	57,61
Sulawesi	7 625,98	1 834,05	24,05	54,11
Sulawesi Utara	970,19	143,71	14,81	50,11
Sulawesi Tengah	1 250,49	277,40	22,18	58,69
Sulawesi Selatan	3 391,33	920,41	27,14	51,44
Sulawesi Tenggara	1 018,13	213,52	20,97	54,79
Gorontalo	437,46	102,12	23,34	59,29
Sulawesi Barat	558,38	176,91	31,68	60,27
Lainnya	9 388,17	1 928,65	20,54	60,70
Bali	2 229,97	186,15	8,35	59,82
Nusa Tenggara Barat	2 057,75	342,24	16,63	66,57
Nusa Tenggara Timur	2 175,23	621,48	28,57	59,81
Maluku	639,18	139,53	21,83	64,19
Maluku Utara	450,69	99,02	21,97	61,71
Papua Barat	336,89	85,32	25,33	55,93
Papua	1 498,45	454,91	30,36	57,48
Indonesia	111 281,74	18 457,79	16,59	59,28

Tabel 8. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Provinsi dan Jam Kerja, Februari 2011

Provinsi	Jumlah Jam Kerja		
	1 - 14 jam	15 - 24 jam	25 - 34 jam
Sumatera	5,62	13,07	16,20
Aceh	6,68	15,18	19,00
Sumatera Utara	4,92	12,87	15,51
Sumatera Barat	6,88	13,09	15,87
Riau	8,01	14,52	14,11
Jambi	6,26	14,53	19,82
Sumatera Selatan	4,19	12,70	18,70
Bengkulu	3,38	8,85	13,10
Lampung	5,95	13,58	15,80
Bangka Belitung	6,34	12,10	13,05
Kepulauan Riau	3,24	6,94	11,63
Jawa	5,17	10,06	12,11
DKI Jakarta	2,25	4,23	7,05
Jawa Barat	4,20	9,11	10,48
Jawa Tengah	5,21	10,66	13,08
D.I. Yogyakarta	6,02	7,28	10,60
Jawa Timur	6,95	12,57	14,84
Banten	3,82	7,82	9,09
Kalimantan	5,41	13,80	15,89
Kalimantan Barat	6,28	19,21	16,00
Kalimantan Tengah	3,89	11,87	16,73
Kalimantan Selatan	6,41	14,09	18,75
Kalimantan Timur	4,16	7,31	11,92
Sulawesi	7,95	13,01	16,17
Sulawesi Utara	4,18	10,20	11,74
Sulawesi Tengah	6,90	12,58	17,57
Sulawesi Selatan	8,43	14,29	16,44
Sulawesi Tenggara	8,77	12,35	17,66
Gorontalo	7,73	10,38	12,78
Sulawesi Barat	12,69	14,30	19,06
Lainnya	6,04	12,88	16,50
Bali	4,39	7,80	9,95
Nusa Tenggara Barat	8,95	13,83	14,81
Nusa Tenggara Timur	7,13	16,72	21,92
Maluku	3,94	11,74	18,00
Maluku Utara	8,34	15,13	16,22
Papua Barat	4,75	12,38	16,17
Papua	3,43	13,52	20,20
Indonesia	5,54	11,35	13,84

Tabel 8. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Provinsi dan Jam Kerja, Februari 2011 (Lanjutan)

Provinsi	Jumlah Jam Kerja		
	35 - 39 jam	40 - 48 jam	49 - 59 jam
Sumatera	11,51	25,09	14,21
Aceh	12,11	23,69	13,13
Sumatera Utara	13,75	27,04	10,83
Sumatera Barat	9,99	22,64	15,03
Riau	9,27	25,37	11,56
Jambi	14,57	23,08	11,53
Sumatera Selatan	10,67	22,30	16,53
Bengkulu	12,83	27,36	21,47
Lampung	10,57	23,93	18,16
Bangka Belitung	9,62	32,98	13,11
Kepulauan Riau	6,32	32,76	17,44
Jawa	9,51	29,73	16,50
DKI Jakarta	6,17	41,31	14,12
Jawa Barat	9,60	31,63	15,92
Jawa Tengah	10,32	28,48	17,19
D.I. Yogyakarta	9,18	30,00	20,99
Jawa Timur	10,24	24,16	17,10
Banten	6,54	38,97	14,23
Kalimantan	11,57	24,98	14,69
Kalimantan Barat	11,11	24,20	12,90
Kalimantan Tengah	12,67	25,48	16,99
Kalimantan Selatan	11,50	23,80	14,04
Kalimantan Timur	11,52	27,06	16,28
Sulawesi	11,70	22,33	14,36
Sulawesi Utara	11,82	31,54	14,20
Sulawesi Tengah	12,44	22,80	13,54
Sulawesi Selatan	12,52	20,17	13,66
Sulawesi Tenggara	10,44	19,75	17,54
Gorontalo	8,36	24,31	17,39
Sulawesi Barat	9,70	21,59	12,48
Lainnya	12,01	24,77	13,84
Bali	8,83	22,70	25,29
Nusa Tenggara Barat	10,02	20,78	14,90
Nusa Tenggara Timur	12,88	25,71	7,18
Maluku	14,11	26,95	11,91
Maluku Utara	11,21	24,63	12,65
Papua Barat	14,23	24,72	10,21
Papua	17,05	31,10	7,01
Indonesia	10,41	27,55	15,54

Tabel 8. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Provinsi dan Jam Kerja, Februari 2011 (Lanjutan)

Provinsi	Jumlah Jam Kerja			
	0* Jam	>=40 jam	>=50 jam	>=60 jam
Sumatera	1,93	51,67	23,81	12,37
Aceh	1,63	45,40	19,89	8,58
Sumatera Utara	1,62	51,34	22,47	13,48
Sumatera Barat	2,40	51,76	26,61	14,09
Riau	2,02	52,07	24,72	15,14
Jambi	1,46	43,35	18,18	8,75
Sumatera Selatan	2,11	51,63	24,74	12,80
Bengkulu	1,35	60,49	28,63	11,66
Lampung	1,83	52,27	24,64	10,18
Bangka Belitung	3,05	55,85	20,49	9,76
Kepulauan Riau	3,79	68,08	32,69	17,89
Jawa	1,85	61,30	29,10	15,08
DKI Jakarta	1,86	78,43	35,72	23,00
Jawa Barat	1,92	64,69	30,92	17,15
Jawa Tengah	2,01	58,73	27,35	13,05
D.I. Yogyakarta	2,64	64,28	32,14	13,28
Jawa Timur	1,60	53,79	26,87	12,54
Banten	1,72	71,02	29,78	17,81
Kalimantan	2,12	51,20	23,43	11,53
Kalimantan Barat	1,95	45,45	18,95	8,36
Kalimantan Tengah	1,06	53,78	24,74	11,32
Kalimantan Selatan	2,89	46,36	19,90	8,52
Kalimantan Timur	2,23	62,86	32,75	19,51
Sulawesi	3,44	47,73	22,79	11,04
Sulawesi Utara	2,80	59,26	25,70	13,52
Sulawesi Tengah	3,18	47,33	22,16	10,99
Sulawesi Selatan	3,65	44,67	21,98	10,83
Sulawesi Tenggara	3,93	46,84	23,58	9,55
Gorontalo	2,42	58,33	31,19	16,64
Sulawesi Barat	3,68	40,56	16,01	6,48
Lainnya	2,09	50,48	23,80	11,87
Bali	1,28	67,76	41,58	19,77
Nusa Tenggara Barat	2,79	49,60	27,13	13,93
Nusa Tenggara Timur	2,59	38,77	12,23	5,88
Maluku	2,42	49,79	20,70	10,93
Maluku Utara	3,22	45,89	18,74	8,60
Papua Barat	2,45	50,02	23,04	15,08
Papua	1,04	44,75	12,62	6,64
Indonesia	2,01	56,85	26,78	13,76

* Sementara tidak bekerja

Tabel 9. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Sektor
(Formal-Informal) dan Provinsi, Februari 2011

Provinsi	Formal (%)	Informal (%)	Jumlah Penduduk Bekerja (Ribu)
Sumatera	39,12	60,88	23 248,17
Aceh	38,92	61,08	1 897,90
Sumatera Utara	39,08	60,92	5 953,34
Sumatera Barat	38,22	61,78	2 113,51
Riau	48,14	51,86	2 408,20
Jambi	38,56	61,44	1 468,66
Sumatera Selatan	34,77	65,23	3 532,14
Bengkulu	30,91	69,09	863,28
Lampung	31,28	68,72	3 645,70
Bangka Belitung	54,14	45,86	587,72
Kepulauan Riau	69,81	30,19	777,73
Jawa	44,09	55,91	64 505,65
DKI Jakarta	75,90	24,10	4 467,12
Jawa Barat	45,49	54,51	18 173,04
Jawa Tengah	37,79	62,21	16 142,44
D.I. Yogyakarta	52,33	47,67	1 849,43
Jawa Timur	36,66	63,34	19 406,03
Banten	58,20	41,80	4 467,60
Kalimantan	43,52	56,48	6 513,78
Kalimantan Barat	32,99	67,01	2 144,34
Kalimantan Tengah	41,93	58,07	1 094,32
Kalimantan Selatan	41,62	58,38	1 737,03
Kalimantan Timur	61,45	38,55	1 538,09
Sulawesi	38,46	61,54	7 625,98
Sulawesi Utara	45,95	54,05	970,19
Sulawesi Tengah	34,69	65,31	1 250,49
Sulawesi Selatan	38,90	61,10	3 391,33
Sulawesi Tenggara	37,13	62,87	1 018,13
Gorontalo	36,50	63,50	437,46
Sulawesi Barat	35,18	64,82	558,38
Lainnya	32,17	67,83	9 388,17
Bali	49,05	50,95	2 229,97
Nusa Tenggara Barat	29,61	70,39	2 057,75
Nusa Tenggara Timur	23,06	76,94	2 175,23
Maluku	31,25	68,75	639,18
Maluku Utara	35,20	64,80	450,69
Papua Barat	38,68	61,32	336,89
Papua	21,82	78,18	1 498,45
Indonesia	41,63	58,37	111 281,74

Tabel 10. Tingkat Pengangguran Menurut Provinsi, Februari 2011

Provinsi	Rincian		
	Jumlah Angkatan Kerja (000)	Jumlah Penganggur (000)	Tingkat Pengangguran (%)
Sumatera	24 825,65	1 577,48	6,35
Aceh	2 068,95	171,05	8,27
Sumatera Utara	6 413,95	460,62	7,18
Sumatera Barat	2 276,00	162,49	7,14
Riau	2 594,11	185,91	7,17
Jambi	1 527,46	58,80	3,85
Sumatera Selatan	3 760,23	228,08	6,07
Bengkulu	893,73	30,45	3,41
Lampung	3 847,18	201,48	5,24
Bangka Belitung	607,44	19,72	3,25
Kepulauan Riau	836,61	58,88	7,04
Jawa	69 723,15	5 217,50	7,48
DKI Jakarta	5 009,83	542,71	10,83
Jawa Barat	20 155,49	1 982,45	9,84
Jawa Tengah	17 184,93	1 042,50	6,07
D.I. Yogyakarta	1 956,54	107,12	5,47
Jawa Timur	20 251,67	845,65	4,18
Banten	5 164,68	697,08	13,50
Kalimantan	6 946,20	432,43	6,23
Kalimantan Barat	2 256,87	112,53	4,99
Kalimantan Tengah	1 135,92	41,60	3,66
Kalimantan Selatan	1 840,53	103,50	5,62
Kalimantan Timur	1 712,90	174,81	10,21
Sulawesi	8 105,90	479,92	5,92
Sulawesi Utara	1 068,42	98,23	9,19
Sulawesi Tengah	1 306,30	55,81	4,27
Sulawesi Selatan	3 634,36	243,02	6,69
Sulawesi Tenggara	1 064,37	46,23	4,34
Gorontalo	458,58	21,12	4,61
Sulawesi Barat	573,89	15,51	2,70
Lainnya	9 798,47	410,30	4,19
Bali	2 295,57	65,60	2,86
Nusa Tenggara Barat	2 174,16	116,41	5,35
Nusa Tenggara Timur	2 234,89	59,66	2,67
Maluku	692,67	53,49	7,72
Maluku Utara	477,52	26,84	5,62
Papua Barat	367,31	30,42	8,28
Papua	1 556,34	57,88	3,72
Indonesia	119 399,38	8 117,63	6,80

Tabel 11. Tingkat Pengangguran Pada Penduduk Usia Muda Menurut Provinsi, Februari 2011

Provinsi	Rincian			
	TPT Usia Muda (%)	Rasio TPT Usia Muda terhadap TPT Dewasa	Share Usia Muda Penganggur terhadap Total Penganggur (%)	Share Usia Muda Penganggur terhadap Total Usia Muda (%)
Sumatera	20,49	6,72	61,11	10,39
Aceh	26,16	6,25	58,75	11,32
Sumatera Utara	21,41	6,30	62,58	12,17
Sumatera Barat	26,42	8,06	61,75	12,06
Riau	22,69	6,55	60,99	10,93
Jambi	13,31	7,12	59,84	6,30
Sumatera Selatan	22,92	10,99	72,19	11,70
Bengkulu	11,03	5,99	55,17	5,25
Lampung	17,49	6,55	57,84	8,80
Bangka Belitung	9,66	5,68	57,73	5,03
Kepulauan Riau	9,66	1,52	28,80	5,37
Jawa	28,14	8,04	60,78	13,93
DKI Jakarta	35,10	6,93	62,23	18,35
Jawa Barat	29,96	5,58	55,35	14,45
Jawa Tengah	27,43	11,14	65,28	13,60
D.I. Yogyakarta	15,25	3,83	36,79	6,70
Jawa Timur	18,63	10,15	62,18	9,27
Banten	45,24	8,93	70,33	23,62
Kalimantan	21,73	8,33	66,03	11,46
Kalimantan Barat	16,88	7,96	65,73	9,32
Kalimantan Tengah	12,59	7,67	63,43	6,43
Kalimantan Selatan	20,46	8,99	66,98	10,58
Kalimantan Timur	35,35	8,31	66,28	18,34
Sulawesi	18,78	6,20	58,20	9,19
Sulawesi Utara	30,01	5,21	46,16	12,59
Sulawesi Tengah	13,84	6,18	56,73	7,04
Sulawesi Selatan	21,96	6,82	60,79	10,35
Sulawesi Tenggara	13,24	6,82	64,79	7,19
Gorontalo	22,00	18,83	78,82	9,03
Sulawesi Barat	6,01	3,52	51,43	3,93
Lainnya	12,36	5,26	54,20	6,65
Bali	13,07	11,79	66,89	7,62
Nusa Tenggara Barat	15,72	5,05	52,24	7,42
Nusa Tenggara Timur	7,03	4,25	49,70	3,82
Maluku	26,65	7,13	59,98	11,67
Maluku Utara	13,20	3,47	45,40	6,43
Papua Barat	19,28	3,50	46,95	9,65
Papua	8,00	3,35	50,95	5,28
Indonesia	23,92	7,40	60,64	12,03

Tabel 12. Persentase Penganggur Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, Februari 2011

Provinsi	Tingkat Pendidikan			
	Tidak Pernah Sekolah (%)	Sekolah Dasar (%)	Sekolah Menengah (%)	Sekolah Tinggi (%)
Sumatera	1,04	37,45	45,88	15,63
Aceh	0,76	35,83	49,11	14,30
Sumatera Utara	0,27	35,51	48,56	15,66
Sumatera Barat	0,45	36,99	42,25	20,32
Riau	0,67	34,57	50,14	14,62
Jambi	0,00	41,78	34,88	23,34
Sumatera Selatan	1,64	42,61	44,82	10,93
Bengkulu	2,27	30,92	43,08	23,73
Lampung	3,07	36,12	43,05	17,76
Bangka Belitung	0,00	45,58	34,86	19,56
Kepulauan Riau	2,00	48,74	41,93	7,34
Jawa	1,16	48,60	38,88	11,37
DKI Jakarta	0,00	16,85	58,80	24,35
Jawa Barat	1,43	59,03	31,87	7,68
Jawa Tengah	0,73	50,36	37,87	11,04
D.I. Yogyakarta	1,75	26,32	46,80	25,13
Jawa Timur	2,19	47,91	39,02	10,88
Banten	0,58	45,28	43,41	10,72
Kalimantan	0,25	39,29	43,81	16,65
Kalimantan Barat	0,95	53,73	35,26	10,05
Kalimantan Tengah	0,00	52,72	21,94	25,34
Kalimantan Selatan	0,00	34,59	50,26	15,15
Kalimantan Timur	0,00	29,58	50,71	19,71
Sulawesi	0,55	37,63	46,30	15,52
Sulawesi Utara	1,04	31,13	51,40	16,43
Sulawesi Tengah	0,00	45,59	45,73	8,68
Sulawesi Selatan	0,66	40,46	43,97	14,91
Sulawesi Tenggara	0,00	27,23	45,16	27,61
Gorontalo	0,00	31,38	61,73	6,89
Sulawesi Barat	0,00	45,36	34,89	19,75
Lainnya	2,88	37,72	44,55	14,84
Bali	1,38	32,79	48,02	17,80
Nusa Tenggara Barat	7,04	52,55	34,12	6,29
Nusa Tenggara Timur	1,98	30,31	47,27	20,44
Maluku	0,00	26,27	57,24	16,49
Maluku Utara	0,00	19,88	60,52	19,60
Papua Barat	0,74	40,13	37,44	21,69
Papua	2,29	38,72	43,42	15,57
Indonesia	1,14	44,74	41,22	12,90

Tabel 13. Tingkat Pengangguran Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, Februari 2011

Provinsi	Tingkat Pendidikan				Total (%)
	Tidak Pernah Sekolah (%)	Sekolah Dasar (%)	Sekolah Menengah (%)	Sekolah Tinggi (%)	
Sumatera	2,56	2,82	8,70	12,08	6,35
Aceh	5,16	4,50	10,42	10,46	8,27
Sumatera Utara	2,47	3,81	9,08	13,59	7,18
Sumatera Barat	2,31	1,92	9,82	14,78	7,14
Riau	3,50	3,03	9,25	11,08	7,17
Jambi	2,10	2,98	4,01	10,81	3,85
Sumatera Selatan	1,45	2,39	10,07	10,07	6,07
Bengkulu	1,01	0,77	4,80	11,71	3,41
Lampung	2,22	1,74	7,84	14,16	5,24
Bangka Belitung	1,67	0,74	4,98	8,38	3,25
Kepulauan Riau	8,71	5,32	7,49	5,85	7,04
Jawa	3,08	4,52	10,87	10,27	7,48
DKI Jakarta	3,72	4,42	12,12	12,88	10,83
Jawa Barat	6,19	7,11	13,05	10,46	9,84
Jawa Tengah	1,88	3,08	10,33	10,60	6,07
D.I. Yogyakarta	2,94	2,56	5,82	11,97	5,47
Jawa Timur	1,34	2,00	6,98	6,48	4,18
Banten	6,95	9,25	18,05	13,27	13,50
Kalimantan	2,47	2,96	9,17	12,60	6,23
Kalimantan Barat	2,31	3,08	8,22	9,09	4,99
Kalimantan Tengah	1,67	2,55	3,96	10,93	3,66
Kalimantan Selatan	2,57	2,11	8,97	11,16	5,62
Kalimantan Timur	3,50	4,48	12,68	16,41	10,21
Sulawesi	2,08	3,17	8,85	8,92	5,92
Sulawesi Utara	3,47	2,76	12,68	16,32	9,19
Sulawesi Tengah	1,07	3,25	6,60	3,89	4,27
Sulawesi Selatan	2,68	4,20	9,81	8,78	6,69
Sulawesi Tenggara	0,72	1,29	5,88	10,74	4,34
Gorontalo	1,88	2,06	10,07	4,32	4,61
Sulawesi Barat	1,27	1,47	3,91	6,64	2,70
Lainnya	1,58	2,25	6,40	8,92	4,19
Bali	1,17	0,83	3,99	5,91	2,86
Nusa Tenggara Barat	3,13	4,79	7,25	5,87	5,35
Nusa Tenggara Timur	0,82	1,23	4,89	9,69	2,67
Maluku	0,71	2,75	11,88	15,13	7,72
Maluku Utara	0,44	1,55	8,89	11,57	5,62
Papua Barat	2,70	4,87	10,87	17,01	8,28
Papua	1,40	1,91	6,20	9,84	3,72
Indonesia	2,69	3,86	9,82	10,57	6,80

Tabel 14. Persentase Setengah Penganggur Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, Februari 2011

Provinsi	Pendidikan				Share Perempuan dalam STP
	Tidak Pernah Sekolah (%)	Sekolah Dasar (%)	Sekolah Menengah (%)	Sekolah Tinggi (%)	
Sumatera	2,66	65,94	24,00	7,40	39,46
Aceh	4,86	59,53	26,90	8,71	40,75
Sumatera Utara	2,11	58,57	29,18	10,15	42,67
Sumatera Barat	0,46	65,33	25,64	8,57	47,36
Riau	1,16	69,30	24,63	4,90	33,08
Jambi	4,05	71,27	18,80	5,88	28,60
Sumatera Selatan	1,15	71,13	23,02	4,70	37,21
Bengkulu	6,91	53,47	28,64	10,98	45,30
Lampung	3,38	73,91	16,93	5,78	39,32
Bangka Belitung	7,08	72,08	15,02	5,82	48,16
Kepulauan Riau	2,35	50,16	34,59	12,90	34,46
Jawa	8,08	70,39	15,75	5,78	46,00
DKI Jakarta	2,39	40,85	37,45	19,31	53,34
Jawa Barat	3,30	73,76	16,70	6,24	37,18
Jawa Tengah	9,53	73,19	13,21	4,08	49,80
D.I. Yogyakarta	6,97	49,36	28,36	15,31	63,04
Jawa Timur	11,22	70,07	14,24	4,47	45,43
Banten	3,53	78,04	12,22	6,21	51,27
Kalimantan	4,74	70,59	18,31	6,35	39,03
Kalimantan Barat	9,44	69,97	15,72	4,88	41,85
Kalimantan Tengah	0,95	72,00	19,36	7,68	39,88
Kalimantan Selatan	1,63	77,40	16,30	4,67	39,86
Kalimantan Timur	1,50	57,67	28,39	12,44	28,79
Sulawesi	6,17	61,51	22,34	9,98	40,36
Sulawesi Utara	0,44	67,70	25,26	6,60	38,39
Sulawesi Tengah	3,82	65,10	19,47	11,60	48,54
Sulawesi Selatan	8,85	60,07	22,22	8,86	33,83
Sulawesi Tenggara	7,09	54,46	25,51	12,94	49,66
Gorontalo	0,00	78,66	7,51	13,83	34,27
Sulawesi Barat	6,31	60,94	24,53	8,22	38,78
Lainnya	9,80	65,74	18,20	6,26	48,33
Bali	12,85	65,39	15,00	6,75	60,37
Nusa Tenggara Barat	12,34	62,47	19,13	6,05	49,03
Nusa Tenggara Timur	5,70	74,84	14,94	4,52	46,66
Maluku	0,74	68,24	25,86	5,17	36,05
Maluku Utara	5,76	68,21	19,78	6,25	42,83
Papua Barat	2,41	54,13	32,01	11,45	34,81
Papua	16,69	46,56	25,31	11,44	32,13
Indonesia	6,74	68,47	18,31	6,47	44,01

Tabel 15. Tingkat Ketidaktifan Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, Februari 2011

Provinsi	Kelompok Umur							
	16 - 30	15 - 64	25 - 54	25 - 34	35 - 54	55 - 64	15+	65+
Sumatera	49,28	27,47	17,87	20,70	15,75	27,62	29,30	58,71
Aceh	56,74	31,37	18,49	20,76	16,72	35,18	33,36	66,79
Sumatera Utara	43,15	24,73	16,14	18,51	14,51	25,55	26,47	55,72
Sumatera Barat	54,35	28,30	16,90	20,44	14,59	28,77	31,58	66,24
Riau	51,80	30,52	20,72	22,89	18,88	36,48	31,64	59,42
Jambi	52,64	28,56	19,00	21,88	16,75	25,49	30,09	56,85
Sumatera Selatan	48,96	26,50	16,42	19,32	14,22	26,74	28,49	59,89
Bengkulu	52,36	24,10	12,30	16,18	9,38	18,83	25,75	50,56
Lampung	49,68	27,30	18,86	22,87	16,04	22,73	28,87	50,44
Bangka Belitung	47,98	29,11	21,37	24,12	19,12	27,78	31,08	67,56
Kepulauan Riau	44,39	30,31	23,80	23,60	24,01	44,74	31,86	82,21
Jawa	50,51	28,57	20,28	22,77	18,67	29,08	30,81	57,88
DKI Jakarta	47,73	30,54	22,20	19,25	24,67	44,65	32,06	71,29
Jawa Barat	51,76	32,84	24,75	27,72	22,67	35,91	34,62	62,13
Jawa Tengah	50,42	25,30	16,68	19,68	14,96	23,51	28,06	54,93
D.I. Yogyakarta	56,06	24,92	13,69	18,78	10,81	20,06	27,89	48,10
Jawa Timur	50,22	25,76	17,82	20,77	16,15	24,66	28,61	55,83
Banten	47,79	30,47	22,27	22,55	22,04	36,31	31,97	71,71
Kalimantan	47,25	26,84	18,38	21,34	16,11	27,52	28,33	58,63
Kalimantan Barat	44,80	23,39	14,12	16,85	12,07	22,83	25,03	55,27
Kalimantan Tengah	48,96	25,39	15,83	18,81	13,38	21,55	26,49	51,34
Kalimantan Selatan	48,30	27,51	18,94	21,85	16,87	29,22	29,32	60,49
Kalimantan Timur	48,14	31,07	24,02	27,15	21,51	36,37	32,34	66,74
Sulawesi	51,09	30,10	20,60	22,00	19,64	33,26	32,25	61,05
Sulawesi Utara	58,05	32,90	23,78	27,99	21,35	33,22	35,29	67,15
Sulawesi Tengah	49,17	25,35	15,89	19,36	13,35	22,91	26,69	50,02
Sulawesi Selatan	52,84	32,50	22,52	22,51	22,52	38,68	34,99	64,03
Sulawesi Tenggara	45,73	26,03	16,67	19,42	14,56	24,59	27,58	52,15
Gorontalo	58,96	34,64	24,55	26,19	23,41	33,04	36,10	61,58
Sulawesi Barat	34,58	21,52	14,93	14,62	15,17	26,47	23,92	57,21
Lainnya	46,15	23,27	13,67	15,34	12,48	22,58	25,32	57,09
Bali	41,67	18,44	10,46	10,25	10,60	22,09	21,51	53,61
Nusa Tenggara Barat	52,82	28,46	18,01	20,69	16,06	25,71	30,31	63,07
Nusa Tenggara Timur	45,68	22,16	11,99	14,24	10,50	18,43	24,90	56,47
Maluku	56,19	28,86	16,32	18,35	14,80	25,58	30,57	55,85
Maluku Utara	51,32	28,39	18,33	20,14	16,83	24,18	29,76	61,21
Papua Barat	49,91	27,84	17,65	19,73	15,78	28,69	28,50	50,39
Papua	33,94	17,83	10,43	11,43	9,60	20,11	18,49	60,57
Indonesia	49,72	27,94	19,19	21,59	17,56	28,56	30,04	58,22

Tabel 16. Persentase Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, Februari 2011

Provinsi	Tingkat Pendidikan			
	Tidak Pernah Sekolah (%)	Sekolah Dasar (%)	Sekolah Menengah (%)	Sekolah Tinggi (%)
Sumatera	2,34	62,51	26,92	8,22
Aceh	2,73	55,37	30,59	11,31
Sumatera Utara	2,36	59,69	29,68	8,27
Sumatera Barat	0,72	60,45	29,02	9,81
Riau	1,93	56,83	31,79	9,45
Jambi	3,66	65,80	22,23	8,31
Sumatera Selatan	1,73	68,26	23,43	6,58
Bengkulu	3,58	64,89	24,62	6,91
Lampung	2,99	71,18	19,27	6,57
Bangka Belitung	3,43	64,71	24,29	7,57
Kepulauan Riau	2,21	49,21	39,76	8,82
Jawa	4,31	63,03	24,38	8,28
DKI Jakarta	0,44	34,03	45,04	20,48
Jawa Barat	1,89	65,80	25,08	7,22
Jawa Tengah	4,87	70,14	18,68	6,31
D.I. Yogyakarta	5,12	46,49	36,89	11,50
Jawa Timur	7,50	64,64	20,84	7,02
Banten	2,78	56,61	29,70	10,91
Kalimantan	3,84	65,11	22,83	8,23
Kalimantan Barat	7,85	69,42	17,21	5,52
Kalimantan Tengah	1,48	70,89	19,14	8,49
Kalimantan Selatan	2,04	70,05	20,27	7,63
Kalimantan Timur	2,05	50,27	35,42	12,26
Sulawesi	4,50	61,38	23,82	10,30
Sulawesi Utara	0,49	59,71	30,54	9,26
Sulawesi Tengah	3,94	63,33	23,20	9,53
Sulawesi Selatan	6,00	59,34	23,31	11,36
Sulawesi Tenggara	4,18	59,43	25,22	11,17
Gorontalo	0,93	74,22	17,50	7,35
Sulawesi Barat	7,21	66,31	18,45	8,04
Lainnya	11,00	59,28	22,76	6,97
Bali	6,18	55,17	30,05	8,61
Nusa Tenggara Barat	11,13	60,84	22,28	5,74
Nusa Tenggara Timur	7,45	70,60	16,33	5,63
Maluku	2,00	63,22	26,37	8,42
Maluku Utara	1,98	63,74	24,76	9,52
Papua Barat	6,73	55,86	26,85	10,56
Papua	30,81	44,58	18,72	5,89
Indonesia	4,43	62,62	24,65	8,30

Tabel 17. Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin, Februari 2011

Lapangan Usaha	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Total
1. Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	1 129 260	696 420	1 045 991
2. Pertambangan dan Penggalian	2 941 937	2 107 525	2 911 844
3. Industri	1 326 461	946 042	1 188 962
4. Listrik, Gas dan Air Minum	2 163 185	3 184 118	2 272 853
5. Konstruksi	1 367 942	2 621 880	1 418 437
6. Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	1 254 915	976 221	1 165 524
7. Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	1 809 604	2 307 877	1 881 186
8. Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	2 086 359	2 200 504	2 120 887
9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	1 991 794	1 363 264	1 677 400
Total	1 640 472	1 275 653	1 510 568

Tabel 18. Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai (Rupiah)
Menurut Lapangan Usaha dan Klasifikasi Daerah, Februari 2011

Lapangan Usaha	Daerah		
	Perkotaan	Perdesaan	Total
1. Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	1 298 277	960 195	1 045 991
2. Pertambangan dan Penggalian	4 015 101	1 643 229	2 911 844
3. Industri	1 276 806	944 955	1 188 962
4. Listrik, Gas dan Air Minum	2 478 510	1 446 244	2 272 853
5. Konstruksi	1 569 807	1 118 308	1 418 437
6. Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	1 228 216	866 956	1 165 524
7. Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	2 052 101	1 238 302	1 881 186
8. Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	2 272 571	1 215 281	2 120 887
9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	1 749 858	1 499 098	1 677 400
Total	1 637 403	1 209 516	1 510 568

Tabel 19. Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai (Rupiah)
Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Februari 2011

Provinsi	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Total
Sumatera			
Aceh	1 539 817	1 423 133	1 497 451
Sumatera Utara	1 493 125	1 273 170	1 425 419
Sumatera Barat	1 666 725	1 596 295	1 640 611
Riau	1 841 774	1 501 299	1 739 875
Jambi	1 436 826	1 156 003	1 349 584
Sumatera Selatan	1 493 090	1 244 537	1 418 640
Bengkulu	1 650 708	1 349 853	1 549 197
Lampung	1 208 564	1 066 041	1 166 095
Bangka Belitung	1 613 396	1 225 721	1 509 470
Kepulauan Riau	2 373 438	1 832 964	2 178 240
Jawa			
DKI Jakarta	2 264 010	1 703 000	2 052 692
Jawa Barat	1 633 266	1 296 810	1 510 984
Jawa Tengah	1 326 365	983 584	1 182 127
D.I. Yogyakarta	1 538 664	1 141 578	1 360 667
Jawa Timur	1 327 062	1 009 045	1 207 812
Banten	1 871 413	1 462 807	1 738 276
Kalimantan			
Kalimantan Barat	1 507 296	1 168 162	1 413 186
Kalimantan Tengah	1 785 841	1 503 304	1 707 732
Kalimantan Selatan	1 718 522	1 295 559	1 594 890
Kalimantan Timur	2 325 572	1 633 584	2 132 315
Sulawesi			
Sulawesi Utara	1 668 094	1 765 509	1 695 246
Sulawesi Tengah	1 552 440	1 302 051	1 455 044
Sulawesi Selatan	1 682 011	1 360 476	1 556 875
Sulawesi Tenggara	1 780 285	1 433 665	1 662 104
Gorontalo	1 422 847	1 216 422	1 334 533
Sulawesi Barat	1 444 793	1 100 344	1 341 809
Lainnya			
Bali	1 702 661	1 254 386	1 544 768
Nusa Tenggara Barat	1 456 815	1 046 540	1 319 832
Nusa Tenggara Timur	1 581 384	1 371 190	1 505 166
Maluku	1 750 343	1 705 326	1 735 826
Maluku Utara	1 867 005	1 643 985	1 795 772
Papua Barat	2 085 968	1 870 396	2 031 521
Papua	2 525 447	1 910 400	2 359 770
Indonesia	1 640 472	1 275 653	1 510 568

Tabel 20. Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai (Rupiah)
Menurut Provinsi dan Klasifikasi Daerah, Februari 2011

Provinsi	Daerah		
	Perkotaan	Perdesaan	Total
Sumatera			
Aceh	1 755 998	1 314 490	1 497 451
Sumatera Utara	1 507 562	1 267 309	1 425 419
Sumatera Barat	1 812 417	1 440 390	1 640 611
Riau	2 070 954	1 352 335	1 739 875
Jambi	1 563 240	1 205 666	1 349 584
Sumatera Selatan	1 648 425	1 168 730	1 418 640
Bengkulu	1 748 938	1 288 843	1 549 197
Lampung	1 393 359	1 009 977	1 166 095
Bangka Belitung	1 639 513	1 307 803	1 509 470
Kepulauan Riau	2 254 646	1 519 359	2 178 240
Jawa			
DKI Jakarta	2 052 692	.	2 052 692
Jawa Barat	1 590 997	1 118 197	1 510 984
Jawa Tengah	1 269 390	1 017 547	1 182 127
D.I. Yogyakarta	1 393 246	1 246 960	1 360 667
Jawa Timur	1 303 449	966 417	1 207 812
Banten	1 848 286	1 109 531	1 738 276
Kalimantan			
Kalimantan Barat	1 546 212	1 278 030	1 413 186
Kalimantan Tengah	2 074 845	1 380 556	1 707 732
Kalimantan Selatan	1 744 141	1 416 941	1 594 890
Kalimantan Timur	2 225 232	1 908 413	2 132 315
Sulawesi			
Sulawesi Utara	1 803 543	1 556 439	1 695 246
Sulawesi Tengah	1 579 106	1 360 268	1 455 044
Sulawesi Selatan	1 771 614	1 272 802	1 556 875
Sulawesi Tenggara	1 910 519	1 441 679	1 662 104
Gorontalo	1 485 185	1 107 500	1 334 533
Sulawesi Barat	1 425 923	1 282 843	1 341 809
Lainnya			
Bali	1 657 185	1 294 182	1 544 768
Nusa Tenggara Barat	1 412 817	1 179 519	1 319 832
Nusa Tenggara Timur	1 672 745	1 372 963	1 505 166
Maluku	1 793 795	1 666 701	1 735 826
Maluku Utara	2 114 946	1 568 966	1 795 772
Papua Barat	2 122 502	1 846 208	2 031 521
Papua	2 401 606	2 290 199	2 359 770
Indonesia	1 637 403	1 209 516	1 510 568

Batasan Kegiatan Informal

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Tenaga Profesional	Tenaga Kepemimpinan	Pejabat Pelaksana dan Tata Usaha	Tenaga Penjualan	Tenaga Usaha Jasa	Tenaga Usaha Pertanian	Tenaga Produksi	Tenaga Operasional	Pekerja Kasar	Lainnya
Berusaha Sendiri	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tak Dibayar	F	F	F	F	F	INF	F	F	F	INF
Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Buruh/Karyawan/Pegawai	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Pekerja Bebas di Pertanian	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Pekerja Bebas di Non Pertanian	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Pekerja Tak Dibayar	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF

Keterangan : F = Formal INF=Informal

AKRONIM

AK	: Angkatan Kerja
BAK	: Bukan Angkatan Kerja
BPS	: Badan Pusat Statistik
EPR	: <i>Employment-to-Population Ratio</i>
ICLS	: <i>The International Conference of Labour Statisticians</i>
ILO	: <i>International Labor Organization</i>
ISCED	: <i>International Standard Classification of Education</i>
ISIC	: <i>International Standard Industrial Classification</i>
KBLI	: Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
KILM	: <i>Key Indicator of Labor Market</i>
MDG's	: <i>Millenium Development Goals</i>
OECD	: <i>Organisation for Economic Co-Operation and Development</i>
SAKERNAS	: Survei Angkatan kerja Nasional
STP	: Setengah Pengangguran
TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka
TPAK	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja